EVALUASI PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syrat-Syarat Guna
Memperoleh Galar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Prodi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Syari'ah

Oleh :

ENDA MERI ASTUTI

NIM : SIP.141720

KONSENTRASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDINJAMBI

TA. 2018

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Enda Meri Astuti
Tempat/TanggalLahir	: Kembang Paseban, 21 Maret 1996
JenisKelamin	: Perempuan
NIM	: SIP. 141720
Jurusan	: Ilmu Pemerintahan
Alamat	: Kelurahan Kembang Paseban, RT 016 kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi , Oktober 2018

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
3DF1CAFF340425641
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Enda Meri Astuti
NIM. SIP.141720

Pembimbing I : Ulya Fuhaidah, S.Hum, M.Si
Pembimbing II : Juharmen, SHI, M.SI
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muaro Bulian KM.16 Simp. Sei Duren
Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, Oktober 2018

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka skripsi Saudari Enda Meri Astuti yang berjudul **"Evaluasi Program Beras Sejahtera (RASTRA) Di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi"** telah disetujui dan dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.

Demikian kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa, bangsa.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Ulya Fuhaidah, S.Hum, M.Si	**Juharmen, SHI, M.SI**
NIP. 198208142011012006	**NIP.198501042015031003**

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "**Evaluasi Program Beras Sejahtera (RASTRA) Di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi**" telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN SulthanThaha Syarifuddin Jambi pada tanggal 06 November 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, November 2018

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Syariah

Dr. A.A. Miftah, M.Ag
NIP.19731125 199603 1 001

PANITIA UJIAN

1.	**Ketua Sidang**	**:Dr. Bahrul Ulum, S.Ag.,MA** **NIP.19700727 199602 1 001**	( )
2.	**Sekretaris Sidang**	**:Dra. Choiriyah** **NIP.19660250 199403 2 001**	( )
3.	**Pembimbing I**	**:Ulya Fuhaidah, S.Hum,M.SI** **NIP.19820814 201101 2 006**	( )
4.	**Pembimbing II**	**:Juharmen, SHI, M.SI** **NIP.19850104 201503 1 003**	( )
5.	**Penguji I**	**:Drs. H. Ibnu Kasir, M.HI** **NIP.19561231 199102 1 001**	( )
6.	**Penguji II**	**: Masburiyah, S.Ag.,M.Fil.I** **NIP. 19720116 200003 2 003**	( )

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR					
KodeDokumen	KodeFormulir	BerlakuTgl	No. Revisi	Tgl. Revisi	Halaman
In.08-PP-05-01	In.08-FM-PP-05-07		R-0	-	1 dan 1

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : Evaluasi Program Beras Sejahtera (RASTRA) Di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi

Yang dipersiapkan dan disusun oleh
Nama : Enda Meri Astuti
NIM : SIP.141720
Telah dimunaqasyahkan pada : 6 November 2018
Nilai Munaqasyah : 83.33(A)
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang

Dr. Bahrul Ulum, S.Ag.,MA
NIP:19700727 199602 1 001

Penguji I

Drs. H. Ibnu Kasir,M.HI
NIP: 19561231 199102 1 001

Penguji II

Masburiyah, S.Ag.,M.Fil.I
NIP: 19720116 200003 2 003

Pembimbing I

Ulyah Fuhaidah, S.Hum.,M.SI
NIP: 19820814 201101 2 006

Pembimbing II

Juharmen, S.HI, M.SI
NIP: 19850104 201503 1 003

Sekretaris Sidang

Dra. Choiriyah
NIP: 19660250 199403 2 001

Jambi, November 2018
FakultasSyariah
UINSulthanThahaSaifuddin Jambi

DEKAN

Dr. A. A Miftah, M. Ag
NIP. 19731125 199603 1001

MOTTO

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya:” Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat”. (QS.An-Nisa’: 58).[1]

[1] Al-Qur’an Surah An-Nisa’: 58.

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan ingin mengetahui pendistribusian Program RASTRA di Kecamatan Mersam, mulai dari pendataan penerima program sampai kepada pendistribusian RASTRA kepada KPM (keluarga penerima manfaat) dalam tingkat kecamatan, faktor penghambat dan pendukung dalam pencapaian tujuan program, dan mengetahui Evaluasi program RASTRA di Kecamatan Mersam. Penelitian ini dilakukan di 3 desa di Kecamatan Mersam yaitu Desa Pematang Gadung, Desa Sengkati Kecil, dan Desa Simpang Rantau Gedang karna 3 desa tersebut memiliki jumlah Penerima program RASTRA terbanyak diantara desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Mersam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualiatitatif yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif dan tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menentukan informan tambahan, peneliti menggunakan teknik *probability sampling* atau *simple random sampling*. Hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa Evaluasi Program Beras Sejahtera (RASTRA) di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi belum berhasil, karna masih banyaknya ditemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan program RASTRA tersebut diantaranya yaitu, mengenai jumlah data penerima manfaat program yang selalu mengalami pengurangan sehingga masih banyaknya masyarakat kurang mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima program, selain itu penerima program PKH tidak bisa dikeluarkan sebagai penerima RASTRA. Selanjutnya bentuk bantuan yang masyarakat terima mulai dari jumlah beras, Harga Tebus Rastra (HTR), waktu datangnya beras yang selalu mengalami keterlambatan, dan kualitas beras tidak seperti yang ditetapkan di dalam pedum RASTRA 2017. Diharapkan dalam pendataan penerima program RASTRA benar-benar dilakukan sebagaimana yang ditetapkan tanpa adanya rasa pilih kasih atau karna kekerabatan, agar program RASTRA bisa dilaksanakan dengan tepat sasaran dan mencapai tujuan dari program ini sendiri.

Kata kunci: Evaluasi, Program beras sejahtera (RASTRA).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan rahmat ALLAH yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sembah sujud serta syukur kepada **ALLAH SWT**. Serta sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan **Rasulullah Muhammad SAW.**

Dengan segenap kasih dan saying dan di iringi do'a yang tulus ku persembahkan karya tulis ini kepada **ibunda Ernawati** dan **ayahanda M.MUSA** tercinta. Berkat do'a mereka saya menjadi semangat, dan kasih saying mereka yang membuat ku menjadi kuat hingga aku selalu bersabar melalui berbagai cobaan dalam menyelesaikan skripsi ini. Senyum bangga dan bahagia di wajah mereka merupakan semangat terbesar dalam hidup saya.

Tak lupa skripsi ini saya persembahkan juga untuk **adik saya Nabilatul Figriyah,** dan **semua keluarga**, teman dan beberapa pihak yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi yang membantu dalam penyelesaian skripsi penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mencurahkan hidup nya untuk menyempurnakan akhlak dan menjadi rahmat bagi umat manusia.

Skripsi ini adalah salah satu wujud di antara karunia Allah yang di limpahkan kepada penulis melalui kemampuan mencurahkan pemikiran ke dalam rangkain karya tulis ini. Selanjutnya penulisan skripsi ini merupakan kewajiban bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Disamping itu juga penulis ingin menyumbangkan karya demi nusa dan bangsa dan agama.

Adapun judul skripsi ini adalah **"EVALUASI PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI."**

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, Penulis tidak dapat berbuat banyak tanpa bantuan, arahan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Karena itu penulis merasa bersyukur kehadirat Allah SWT dan menghaturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. H. Hadri Hasan, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak DR. A. A. Miftah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. BapakH. Hermanto Harun, Lc., M.HI., Ph.D selaku Pembantu Dekan I, Ibu DR. Rahmi Hidayati., M.Pd.I selaku Pembantu Dekan II, dan Ibu DR. Yuliatin., S.Ag., M.HI selaku Pembantu Dekan III, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

4. Ibu Mustiah, S.Ag, M.Sy selaku ketua jurusan danIbu Tri Endah Karya Lestari, S.Ip. M.IP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Ibu UlyaFuhaidah,S.Hum, M.SI selaku pembimbing I dan Bapak Juharmen, SHI, M.SI selaku pembimbing II yang banyak meluangkan waktu dalam bimbingan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Karyawan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Masyarakat Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi yang telah banyak meluangkan waktu untuk menjadi informan dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca. Semoga Allah melimpahkan rahmatNya atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnyakepada Allah SWT lah segala usaha dan upaya penulis berserah diri. Besarharapan saya semoga skripsi ini ada manfaatnya.

Jambi, Oktober 2018

Penulis

ENDA MERI ASTUTI

NIM: SIP. 141720

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PERYATAAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xiii**

DAFTAR TABEL ..... **xiv**

DAFTAR BAGAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah 1
B. RumusanMasalah 4
C. BatasanMasalah 5
D. TujuandanKegunaanPenelitian 5
E. KerangkaTeori 7
F. TinjauanPustaka 11

BAB II METODE PENELITIAN

A. LokasiPenelitian 14
B. JenisPenelitian……..... 14
C. Sumber Data 15
D. InstrumenPengumpulan Data 16
E. Tekhnik Analisis Data 19
F. SistematisPenulisan 21
G. Jadwal Penelitian 22

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. HistorisdanGeografis 23
B. StrukturOrganisasiPemerintahan 26
C. VisidanMisiKecamatanMersam 28
D. KeadaanPendudukdanPendidikan 28
E. Tim KoordinasiKecamatan 31
F. Susunan Tim Koordinasipenyaluran RASTRA Kecamatan…… 32

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pendistribusian Program RASTRA Di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari 35
B. Kendala dan Pendukung Program RASTRA Di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi 49
C. Evaluasi Program RASTRA Di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 66
B. Saran-saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR SINGKATAN

RASTRA : Beras Sejahtera

PEDUM : PedomanUmum

KPM : KeluargaPenerimaManfaat

BPS : BadanPendataanStatistik

MUSDES : MusyawarahDesa

MUSKEL :MusyawarahKelurahan

DPM : DaftarPenerimaManfaat

HTR : HargaTebusRastra

SPA : SuratPermintaanAlokasi

BAST : BeritaAcaraSerahTerima

PKH : Program KeluargaHarapan

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : KriteriaEvaluasiKebijakan…….....9

Tabel 2 : JadwalPenelitian.....22

Tabel 3 : Jumlah Penduduk.....29

Tabel 4 : KeadaanSerana Pendidikan.....30

Tabel 5 : KeadaanPendidikan Informal……...31

Tabel 6 : Susunan Tim KoordinasiKecamatan……33

Tabel 7 : Jumlah penerima manfaat program RASTRA.....44

Tabel 8 : Jenjang Ekonomi Masyarakat……...53

DAFTAR BAGAN

Struktur Organisas Kecamatan Mersam..... 27

Mekanisme Penyaluran Program RASTRA……..……. 45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu problem yang muncul dalam kehidupan masyarakat, sehingga menuntut adanya suatu upaya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi, dan menyeluruh dalam waktu yang singkat.Dalam menjawab persoalan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pengentasan kemiskinan, di mana salah satunya adalah program beras sejahtera (RASTRA).[2]

RASTRA merupakan salah satu dari berbagai program-program pro rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.Tahun 2009 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan membantu masyarakat miskin melalui Peraturan Presiden No.13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi rendahnya daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan adalah melalui Intruksi Presiden No. 3 tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan beras dan penyaluran beras oleh pemerintah atau perberasan nasional. Mengacu kepada peraturan presiden diatas, jelas bahwa program beras sejahtera masuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri

[2]Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial dasar*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.343.

atas program-program untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.[3]

Penyaluran beras untuk rumah tangga miskin sudah dimulai sejak 1998.Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan RASTRA yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi RASKIN, mulai tahun 2002 RASKIN diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (*social sofety net*) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan RASKIN menjadi nama program diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan RASKIN. Tetapi semenjak pertengahan tahun 2015 penamaan program ini berubah menjadi program beras sejahtera (RASTRA) dengan alasan supaya program ini bisa menimbulkan dampak yang lebih baik dari sebelumnya.[4]

Di Kabupaten Batang Hari masih banyak terdapat masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama kebutuhan pangan pokok berupa beras.Kondisi ini juga sangat terasa di Kecamatan Mersam sebagai salah satu kecamatan dari total 8 kecamatan di Kabupaten Batang Hari.Sehingga masih banyak rumah tangga miskin yang membutuhkan program beras sejahtera dikarenakan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan di sisi lain harga barang-barang kebutuhan semakin mahal, termasuk kebutuhan pangan.

Dalam program RASTRA, penerima manfaat RASTRA disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah keluarga penerima manfaat program RASTRA

---

[3]Suparti, "Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Miskin(RASKIN) di Kecamatan Samarinda Ulu,"*Journal Administrative Reform,* Vol.5.No.1, (2017), hlm, 285.

[4]Http://www.bulog.co.od/sekilas*raskin*, diakses pada 28 Desember 2017.

di Kecamatan Mersam masih cukup banyak, sehingga perlu adanya program pengentasan kemiskinan seperti program RASTRA ini guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan terbebas dari kemiskinan. Selain itu, masih banyak masyarakat Kecamatan Mersam terutama dari rumah tangga sasaran yang mengandalkan program RASTRA didasarkan pada fakta bahwa harga beras RASTRA yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan harga beras di pasaran yang terbilang mahal.

Menurut pedoman umum (PEDUM) RASTRA 2017, Program RASTRA adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian atau Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan RASTRA. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

Namun program RASTRA yang sudah berjalan beberapa tahun belakangan ini masih saja ditemukan masalah khususnya dalam pelaksanaan pendistribusian RASTRA. Sebagai tahap awal pengamatan di salah satu Kecamatan di Kabupaten Batang Hari, tepatnya di RT 16 Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam dengan jumlah penerima manfaat program RASTRA

sebanyak delapan orang, di mana Program RASTRA yang semestinya disalurkan kepada keluarga miskin ternyata banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat lain (keluarga yang tergolong mampu), dengan alasan untuk menghindari kecemburuan sosial antara masyarakat di RT 16 tersebut, dengan cara melakukan sistem bergantian dalam mendapatkan bantuan ini. Salah sasaran ini banyak disebabkan oleh *human error*, dimana petugas dilapangan justru membagikan RASTRA kepada keluarga dekat aparat desa itu sendiri. Masalah kedua yang sering ditemui yaitu mengenai beras, dimana masih banyaknya keluhan dari KPM (keluarga penerima manfaat) yang mengatakan bahwa beras yang diterima dari program ini kurang bagus bahkan kurang layak untuk dikonsumsi sehingga membuat masyarakat melakukan pemebersihan beras pada tempat penggilangan beras dan masih banyaknya keluhan masyarakat akan harga beras tersebut.[5]

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu pengevaluasian terhadap program beras sejahtera (RASTRA) sebagai bentuk bahwa program ini terealisasi dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, dengan demikian penulis mengangkat judul **"Evaluasi Program Beras Sejahtera (RASTRA) Di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana distribusi program beras sejahtera (RASTRA) di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi ?

[5]Wawancara Dengan Ibu Ernawati dan Ibu Asnidar, Keluarga Penerima Manfaat rastra, di RT 16 kelurahan kembang paseban kecamatan mersam, 05 Januari 2018

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan Pendukung keberhasilan Program Beras Sejahtera (RASTRA) di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi ?
3. Bagaimana Evaluasi Program Beras Sejahtera (RASTRA) Di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi ?

C. Batasan Masalah

Batasan penelitian merupakan suatu langka untuk memberikan arah yang hendak diteliti menjadi jelas dan mudah dipahami, selain itu batasan penelitian juga diperlukan untuk lebih memusatkan perhatian pada permasalahan yang hendak diteliti.Agar pembahasan ini tepat sasaran dan tidak terlalu meluas maka peneliti membuat fokus penelitian yang peneliti lakukan.Fokus penelitian sesuai dengan judul “Evaluasi Program Beras Sejahtera (RASTRA) Di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi” tepatnya di Desa Sekati Kecil, Desa Pematang Gadung, dan Desa Simpang Rantau Gedang.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah :

a. Ingin mengetahuidistribusi beras sejahtera (RASTRA) di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi yang meliputi :
   (1) Pendataan,
   (2) Sosialisasi,
   (3) Pendistribusian.

b. Ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung atas keberhasilan Program Beras Sejahtera (RASTRA) di Kecamatan Mersam KabupatenBatang Hari Provinsi Jambi.

c. Ingin mengetahui Evaluasi Program RASTRA di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

Apabila dari tujuan-tujuan tersebut berjalan dengan baik, maka penelitian ini akan digunakan :

a. Dapat menambah dan memberikan wawasan dan pengetahuan serta menganalisis kajian-kajian baru untuk wahana bidang keilmuan khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

b. Bagi pihak yang terkait, khususnya bagi praktisi pendidikan, masyarakat umum maupun pemerintah. Penelitian ini juga dibuat sebagai sumbangsih penulis untuk refrensi kepada mawahasiswa dalam melakukan penelitian tentang Program RASTRA (Beras Sejahtera) di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, serta sebagai sumbang dan saran dalam upaya peningkatan produktivitas program RASTRA di Kabupaten Batang Hari provinsi jambi.

c. Penulisan karya ilmiah ini menjadi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana stara satu (S1) pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori

1. Evaluasi kebijakan

Menurut Lowi kebijakan adalah pernyataan umum yang dibuat oleh ototritas pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku warga negara dengan menggunakan sangsi-sangsi yang positif dan negatif.[6]Menurut Arikunto kebijakan merupakan suatu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kebijakan itu menempel pada lembaga yang sifatnya formal serta kebijakan itu dapat diterapkan pada perorangan, yaitu ketika kita mempunyai rencana untuk melakukan suatu kegiatan. Setelah kebijakan yang berupa rencana tersebut kita laksanakan, kita tentu segera ingin tahu apa yang terjadi, bagaimana keterlaksanaan rencana tersebut, dan bagaimana hasinya.[7]Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mendefenisikan kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah-laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.[8]

Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tindakan kongkret dari pemerintah untuk lebih memperhatikan kelompok masyarakat bawah dan kebijakan nyata

---

[6] Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, (Jakarta: CV Rajawali,1998), hlm.4

[7] Arikunto Suharsimi, *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara,2014), hlm.7

[8] Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1996), hlm. 47

dalam membantu mereka sangat diperlukan agar proses penyesuian menghasilkan kesenjangan.[9]

Program beras sejahtera adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu. Upaya mengentas kemiskinan ini juga merupakan anjuran agama Islam untuk meminimalisir bahaya-bahaya yang timbul dari kemiskinan tersebut, maka Islam memerintahkan kaum muslim untuk menyantuni orang-orang miskin. Hal ini seperti yang termuat pada QS. Al-Baqarah ayat 177, yaitu :

> "Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, anak-anak yatim, orang-orang miskin musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya.." (QS.Al-Baqarah : 117).[10]

Salah satu orientasi kebijakan adalah keberhasilan dalam pelaksanaannya, akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit dari kebijakan-kebijakan yang mengalami kegagalan. Untuk konteks Indonesia, rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal paling berat, karna di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai di dalam konsep, muncul dilapangan.Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi.Banyak sekali teori-teori implentasi kebijakan, salah satunya yaitu teori jaringan. Teori ini memahami bahwa proses

---

[9] Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, (Jakarta: Granit,2014), hlm.54

[10]Q.S Al-Baqarah (1), hlm. 117

impementasi kebijakan merupakan sebuah *comflex of interaction processes*diantara sejumlah besar aktor yang berada dalam suatu jaringan (network) aktor-aktor yang independen. Interaksi di antara para aktor dalam jaringan tersebut lah yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan, permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan, dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting didalamnya. Pada teori ini semua aktor dalam jaringan relative otonom, artinya mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda, tidak ada aktor yang menjadi koordinator.[11]Gotner menjelaskan terdapat lima tahap proses terjadinya kebijakan: identifikasi masalah, formulasi, legitimasi, aplikasi, dan evaluasi. Langkah terakhir dari pembuatan kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah penilaian secara menyeluruh input, proses, outputs (hasil), dan outcomes (dampak). Melalui evaluasi akan diketahui apakah kebijakan yang ditetapkan berhasil mencapai tujuannya atau tidak.[12]Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Berikut kriteria evaluasi menurut William N. Dunn :

Tabel 1

Kriteria Evaluasi

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan

[11]Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.223

[12]Hanif Nurcholis,*Teori dan praktik pemerintah dan otonomi daerah,*(Jakarta: Grasindo, 2007), hlm.275

	telah dicapai?
Efesiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada mereka kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakn memuaskan kebutuhan,prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?[13]

Proses evaluasi dimaksudkan untuk menguraikan dan memahami dinamika internal berjalannya suatu program/kebijakan, dimana proses evaluasi selalu memerlukan deskripsi rinci tentang berjalannya suatu program/kebijakan.[14]Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja.Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai "evaluasi kebijakan".Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai.

[13]William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2003), hlm, 610

[14]Ibid, hlm, 8

Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.[15]

F. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang integral seperti yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti.Penelitian tentang evaluasi program RASTRA ini sudah banyak dilakukan, antara lain oleh. Yeni Juwita (2016) berjudul “Evaluasi Beras Sejahtera (RASTRA)” penelitian yang dilakukan di keluruhan sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, secara umum belum terlaksana secara efektif karna masih banyak terdapat kekurangan dan penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan program RASTRA tersebut, diantaranya pendataan penerima program RASTRA belum tepat sasaran,sehingga masih banyak masyarakat yang keadaan ekonominya rendah tidak bisa mendapatkan bantuan ini,selain itu terjadi keterlambatan pendistribusian beras dan tidak ada kepastian tanggal ketika beras akan didistribusikan. Dari penelitian di atas, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang saya lakukan.Penelitian di atas hanya mencangkup sebatas kelurahan, tetapi dalam penelitian yang peneliti lakukan cangkupannya adalah kecamatan, sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang evaluasi program beras sejahtera (RASTRA).[16]

Penelitian selanjutnya oleh Nurhayati (2014) yang berjudul “Evaluasi Program Beras Miskin (RASKIN)” di Kelurahan Kampung Bulang

---

[15]Ibid, hlm.226

[16]Yeni Juwita, “Evaluasi Program Beras Sejahtera (rastra),” Naskah Publikasi Universitas Maritim Raja Ali haji Tanjung Pinang,(2016), hlm.19

KecamatanTanjung Pinang Timur.Penulis Skripsi ini menyimpulkan bahwa pendistribusian subsidi beras raskin (RASKIN) dikatakan cukup baik, tetapi kurang optimal dalam melakukan sosialisasi program raskin tersebut,tetapi dalam indikator ketetapan sasaran, indikator ketetapan waktu, dan dalam indikator kualitas dinilai masih kurang baik. Dalam penelitian ini hasil objek evaluasi, yang meliputi indikator: (1)Tingkat keberhasilan dan kepuasan masyarakat terhadap program beras miskin (RASKIN) masih kurang baik. Serta pada indikator (2) meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan dinilai sudah sangat membantu masyarakat miskin, namun masih harus di optimalkan lagi. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu, sama-sama meneliti masalah evaluasi program RASTRA dan berfokus pada implemtasi dan tingkat keberhasilan program tersebut, perbedaannya hanya sebatas cangkupan dimana penelitian ini sebatas kelurahan, sedangkan penelitian saya cangkupannya kecamatan.[17]

Penelitian selanjutnya oleh Yuma Yunita(2014) dengan judul "Evaluasi keberhasilan program beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN) dan manfaatnya bagi rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) di Kecamatan IV Negri Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan".Penulis skripsi inimenyimpulkan Pelaksanaan program RASKIN di daerah penelitian sudah cukup berhasil, terutama pada indikator tepat waktu dan tepat administrasi.Namun, masihterdapat ketidaktepatan pada beberapa indikator, yaitu pada indikator harga dan ketidaktepatan sasaran serta jumlah beras yang

[17]Nurhayati, "Evaluasi Program Beras Miskin," Naskah Publikasi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang,(2014),hlm. 21

diterima.Selain itu, kualitas beras yang kurang bagus juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan program di daerah ini.Pelaksanaan program RASKIN di daerah penelitian sudah memberikan manfaat bagi RTS-PM, namun tingkat manfaat yang dicapai masih termasuk pada kategori "kurang bermanfaat".Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu mengenai masalah faktor penghambat dan pendukung, sedangkan penelitian ini hanya memfokuskan pada implementasinya semata.[18]

Penelitian selanjutnya oleh Citra Gustianda (2013) dengan judul "Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin" Di Kelurahan Kisara Baru Kecamatan Kiasaran Barat Kabupaten Asahan.Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin di Kelurahan Kiasaran adalah baik. Dari penelitian di atas, persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang evaluasi program beras untuk keluarga miskin, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini hanya memfokuskan pada pelaksanaan program dilihat dari enam indikator keberhasilan program dengan menggunakan tehnik penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan selain membahas tentang pelaksanaan program, juga membahas tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam keberhasilan program dengan menggunakan tehnik penelitian deskriftif kualitatif.[19]

---

[18]Yuma Yunita, "Evaluasi Keberhasilan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (raskin) dan Manfaatnya Bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat(rts-pm)," Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang,(2014), hlm.71

[19] Citra Gustianda, "Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan" (2013), hlm. 1

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 3 desa yang terdapatdi Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Adapun pemilihan lokasi diwilayah Kecamatan Mersam tersebut berdasarkan data yang didapat, ada 3 desa yang memiliki jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) program RASTRA yang banyak dari desa yang lain yaitu Desa Sengkati Kecil, Desa Pematang Gadung, dan Desa Simpang Rantau Gedang. Jadi, penelitian ini hanya berfokus pada tiga desa tersebut dengan lingkup penelitian tentang Evaluasi Program Beras Sejahtera (RASTRA) di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriftif kualitatif yang membahas tentang bagaimana Evaluasi Program Beras Sejahtera (RASTRA) di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Penelitian deskriftif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya atau disebut penelitian noneksprimen, karna peneliti tidak melakukan kontrol dan memanipulasi variable penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa komponen dalam pengumpulan data yaitu melalui dokumentasi, observasi dan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan tema penelitian ini.

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah datapokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data penelitian yang diperoleh di lapangan. Adapun sumber data baru yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah informan yaitu orang-orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, diantaranya :

1. Tim Koordinasi Program RASTRA di Kecamatan,
2. Tim Koordinasi Program RASTRA di Desa,
3. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program beras sejahtera.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat authentik, karena sudah diperoleh oleh tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.[20] Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

I. Historis dan geografis kecamatan
II. Struktur pemerintahan kecamatan.
III. Visi dan misi Kecamatan Mersam
IV. Keadaan penduduk
V. Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan

[20]Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*,(IAIN STS Jambi: Fakultas Syari'ah dan Syaria'ah press, 2014), hlm. 34.

D. Instrumen Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa aparat pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Mersam dengan memberikan pertanyaan tentang masalah yang peneliti teliti yaitu tentang Program RASTRA.Dalam wawancara ini terdapat informan kunci *(Key Informan*) dan informan tambahan.

Adapun informan kunci (*Key Informan)* dalam penelitian ini yaitu :

1. Tim Koordinasi Kecamatan: Bapak Sopyan dan Agus
2. Tim Koordinasi Desa Pematang Gadung : Bapak Tarmud Mursidi
3. Tim Koordinasi Desa Sengkati Kecil : Ibu Toybah
4. Tim Koordinasi Desa Simpang Rantau Gedang : Bapak Budi.

Agar hasil penelitian ini lebih objektif, penelitian ini melakukan penggalian informasi melalui wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program RASTRA yaitu sebanyak 81 orang. Jumlah tersebut ditentukan dengan menggunakan teknik *probability sampling* atau *simple random sampling* dimana sampel diambil secara acak, tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi, tiap elemen populasi memiliki peluang yang sama dan diketahui untuk terpilih sebagai subjek.[21]Jumlah KPM ini didapati dengan menggunakan rumus dari Taro Yamane, yang mana jumlah awal KPM RASTRAdi tigadesa tersebut sebanyak 427.Mengingat waktu, tenaga dan dana kemungkinan adanya

[21]Juliansyah Noor, *Metodoligi Penelitian*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2011),hlm.151.

hambatan-hambatan, jumlah sampel diambil dengan menggunakan Rumus Taro Yamane adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{n} = \frac{N}{N.d + 1}$$

Dimana : n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d^2 = Presisi yang ditetapkan

jadi : $n = \frac{427}{427.0,1 + 1}$

$= \frac{427}{427.(0,01)+1}$

$= \frac{427}{5,27} = 81,02$

= 81 Orang.[22]

Jadi, dari tiga desa yang menjadi objek penelitian diperoleh81orang yang menjadi responden sebagai penerima manfaat program RASTRA.Dalam hal pencatatan hasil wawancara, ada lima cara yang lazim di pergunakan dalam hal pencatatan hasil wawancara, kelima cara itu adalah :

a) Pencatatan langsung,
b) Pencatatan dari ingatan,
c) Pencatatan dengan tehnik merekam (*recording*),
d) Pencatatan dengan angka atau kata-kata yang menilai(*field ranting),*

[22]Riduan, Akdon, *Rumus Dan Data Dalam Analisis Statistik*, (Bandung:Alfabeta, 2009), hlm.249.

e) Pencatatan dengan menuliskan kode-kode tertentu, bukan angka *(field rating).*[23]

b. Observasi

Observasi penelitian ini dilakukan di kecamatan Mersam, Tepatnya di tiga desa yang menjadi lokasi penelitian yaitu Desa Sengkati Kecil, Pematang Gadung, dan Simpang Rantau Gedang, pengamatan ini diharapkan agar mendapatkan informasi tentang Program RASTRA. Observasi ini dilakukan ditingkat masyarakat penerima program RASTRA serta aparat pemerintah setempat yang memiliki tanggung jawab terhadap berjalannya program RASTRA.

c. Dokumentasi

Dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh semua data-data berupa bahan-bahan atau arsip yang berhubungan dengan penelitian, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan penunjang dalam penganalisisan data yang ada di lapangan. Dokumentasi ini berasal dari sumber-sumber baik berupa surat, foto, laporan maupun staf pemerintah dan masyarakat di lingkungan Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.Berdasarkan hal di atas dapat dikemukakan disini bahwa analisis data yang digunakan peneliti adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, wawancara, dan bahan lain sehingga dapat dipahami dengan

---

[23] Bagong Suyanto,Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2005), hlm. 80.

mudah, serta membuat kesimpulan atau analisa dengan tujuan agar dapat di informasikan dan mudah untuk dipahami oleh orang lain.

E. Teknik Analisis Data

Analis data kualitatif menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai jenuh. Teknik analisis data ini meliputi tiga komponen analisis yaitu :

1. Reduksi Data

   Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian padapenyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari data–data tertulis dilapangan. Selain itu, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi, cara yang dipakai dalam reduksi data dapat melalui seleksi yang panjang, melalui ringkasan atau singkatan menggolongkan kedalam suatu pola yang lebih luas.

2. Penyajian Data (Display)

   Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan menganalisis. Penyajian data lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)

Mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, dan alur sebab akibat dan proposi.Kesimpulan–kesimpulan senantiasa diuji kebenarannya, kekompakanya, dan kecocokan yang merupakan validitasnya sehingga akan memperoleh kesimpulan yangjelas kebenaranya. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan penulis pada saat penelitian. Data yang diuji kebenarannya adalah permasalahan distribusi RASTRA mulai dari pendataan, sosialisasi dan penyalurannya, serta mengenai faktor penghambat dan pendukung keberhasilan program RASTRA, dan bagaimana Evaluasi Program RASTRA Di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.[24]

[24]Sugiyono, *Metode Peneletian Pendidikan Pendekatan Kualitatif,Kuantitatif,dan R&D,* (Alfabeta:Bandung, 2013), hlm. 337

F. Sistematis Penelitian

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis menyusunnya ke dalam bab-bab yang masing-masing memiliki sub-sub bab, dengan penyusunan sebagai berikut :

BAB I :Pendahuluan merupakan bab yang diawali dengan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,kerangka teori, dan tinjauan pustaka.

Bab II :Merupakan bab kajian metodologi, oleh karena itu bab ini diberikan nama Metodologi Penelitian. Bab II ini berisikan mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data,instrument pengumpulan data, dan tekhnik analisis data.

Bab III : Merupakan bab penelitian awal yang berisikan historis dan geografis,struktur organisasi pemerintah, visi misi kecamatan, keadaan penduduk dan keadaan pendidikan, dan Tim koordinasi kecamatan.

Bab IV : Pembahasan yang menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini, tentang Evaluasi Program Beras Sejahtera (RASTRA) di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

BAB V : Penutup yang terdiri dari: Kesimpulan dan saran

G. Jadwal Penelitian

Tabel 2

Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2017-2018																							
		Desember - Januari				Maret				April				Mei				September -Oktober				november			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			x																					
2	Pembuatan proposal	x	x																						
3	Perbaikan Proposal dan Seminar					x	x	x																	
4	Surat Izin Riset										x														
5	Pengumpulan Data											x	x												
6	Pengolahan Analisi Data															x	x								
7	Pembuatan Laporan																								
8	Bimbingan Dan Perbaikan																		x	x	x				
9	Agenda dan Ujian Skripsi																					x			
10	Perbaikan dan penjilitan																						x	x	

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Historis dan Geografis

1. Historis

Mengenai asal usul Kecamatan Mersam, pada saat kondisi Desa dan Sejarah Desa Sebelum menjadi desa devinitif, pada awalnya Desa Mersamdi ambil dari nama sungai yaitu sungai Mersam dan masih berstatus Margo Kembang Paseban yang dipimpin oleh Pesirah Abdul Majid yang bergelar Majid Batu, dan berkedudukan di bawah kepemimpinan Depati Ismail Batu.Pada awalnya desa ini dibagi menjadi dua wilayah dusun, yaitu : Dusun Ulu, dan Dusun Ilir. Kedua dusun tersebut dibawah satu wilayah bernama Mersam, nama sungai dari anak sungai Batang Hari. [25]

Kepemimpinan Desa Mersam silih berganti, adapun tokoh-tokoh yang pernah memimpin Desa Mersam ini adalah sebagai berikut : Pada awal berdirinya Mersam dipimpin oleh Mangku H.Jusuf yang menjadi mangku selama dua Periode memimpin Desa Mersam yaitu dari tahun 1957 sampai dengan tahun 1973, atau setara dengan 2 Periode pada saat itu, dan sebagai wakil mangku yaitu A.Kadir. Setelah Mangku H. Jusu sudah tidak dapat melaksanakan tugas sebagai mangku di karenakan Faktor usia, maka diganti kepemimpinannya oleh Saman Sumar dari tahun 1973 sampai dengan 1981, dan sebagai wakilnya M.Zaini H. Majid. Pada tahun 1981 Desa Mersam dari Mangku berubah nama menjadi Kepala Desa, dan pada saat itu juga masih dibawah kepemimpinan Saman Sumar

[25]Sumber data: Dokumentasi Kecamatan Mersam, Tahun 2008

dan Sekdes M.Zaini H. Majid sampai dengan tahun 1989, dikarenakan Sekdes M. Zaini H.Majid sakit pada tahun 1988 sampai dengan 1989 di peltukan kepada Dahdi Fi'i. Pada tahun 1989, diadakan pemilihan kepala desa secara terbuka dan demokrasi.[26] Pada kelanjutannya desa Mersam diakui sebagai Desa Definitif adalah pada zaman Mangku Saman Sumar, mungkin karena pada saat itu ada anggapan bahwa seorang pemimpin dapat menjabat seumur hidup, maka Saman Sumar secara otomatis langsung menjabat sebagai kepala Desa; dan tepatnya pada tahun 1981 nama Mangku diganti menjadi Kepala Desa, secara otomatis Desa Mersam dijadikan desa devenitif oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan pada akhirnya setelah adanya pemekaran maka nama desa Mersam dijadikan sebagai nama Kecamatan.[27]

2. Geografis

Kecamatan Mersam mempunyai luas wilayah lebih kurang 801,9 Km Persegi. Yang berada di posisi 102°47'08,6" Bujur Timur dan 01°24'03,1" Lintang Selatan dengan batasan-batasan wilayah adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Tembesi.

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Maro Sebo Ulu.

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bathin XXIV.

---

[26]Sumber data: Dokumentasi Kecamatan Mersam, Tahun 2008

[27]Perda No 07 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II sarko & Tanjung Jabung

Sedangkan dengan demikian jarak tempuh Ibu Kota Kecamatan Mersam sebagai berikut:

a. Jarak tempuh dengan Ibu Kota Provinsi adalah 120 Km dengan jarak waktu tempuh lebih kurang 2 jam perjalanan kendaraan bermotor.
b. Jarak tempuh dengan Ibu Kota Kabupaten adalah 60 Km dengan jarak waktu tempuh lebih kurang 1 jam perjalanan kendaraan bermotor.
c. Jarak tempuh dengan desa-desa terjauh di Kecamatan Mersam 10 Km dengan jarak waktu tempuh lebih kurang 45 menit perjalanan kendaraan bermotor.

Sementara itu tidak jauh berbeda dengan daerah tropis lainnya yang ada di Provinsi Jambi, maka keadaan musim diKecamatan Mersam hampir sama yaitu mengalami dua musim yaitu musim panas dan musim hujan. Kondisi suhu pada siang hari mencapai 36°C dan pada malam hari mencapai 20°C kalau dilihat dari sinar Matahari, biasanya pada bulan J sampai Juni sampai dengan bulan Agustus yang merupakan bulan-bulan yang relatif kering, dimana penyinaran Matahari lebih tinggi dari pada bulan Oktober sampai dengan bulan April yang relatif lebih basah. Bagi masyarakat, penyinaran Matahari digunakan untuk keperluan rumah tangga, seperti untuk mengeringkan pakaian dan lain sebagainya.

Jika dihitung-hitung penyinaran Matahari di Kecamatan Mersam sebesar 50% yaitu setara dengan 4,25 jam perhari dengan rata-rata setiap bualan yang tertinggi terdapat pada bulan Juni yaitu sebesar 70% setara dengan 5,45 jam

perhari dan yang terendah pada bulan Oktober sampai dengan pertengahan Desember yaitu sebesar 40% setara dengan 3,2 jam perhari. [28]

Sedangkan sumber air tergantung pada air sungai dan sumur penduduk Kecamatan Mersam, sebagian di daerah yang dekat dengan Ibu Kota Kecamatan menggunaka sumber air PDAM, dan sumber air yang berasal dari sumur galian tanah, masyarakat menggunakan air tersebut untuk memasak, mandi, mencuci, MCK, dan keperluan lainnya. Jika musim kemarau datang biasanya masyarakat menggali sumur mereka untuk mendalami kedalamannya, tujuannya agar airnya tetap keluar dan mencukupi keperluan sehari-hari mereka.

B. Stuktur Organisasi Pemerintahan

Suatu wilayah biasanya harus mempunyai setidaknya tiga persyaratan unsur penting yaitu adanya rakyat, pemimpin atau pemerintah, dan daerah kekuasaan.Maka dengan hal itu juga Kecamatan Mersam dipimpin oleh seorang Camat.Dengan demikian berjalan atau tidaknya suatu pemerintah sangat bergantung kepada kemampuan, kemauan, dan kecakapan dari pemimpinnya. Adapun struktur pemerintah Kecamatan Mersam adalah sebagai berikut :

[28]Sumber data: Dokumentasi Kecamatan Mersam, Tahun 2016

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KECAMATAN MERSAM

KABUPATEN BATANGHARI TAHUN 2016[29].

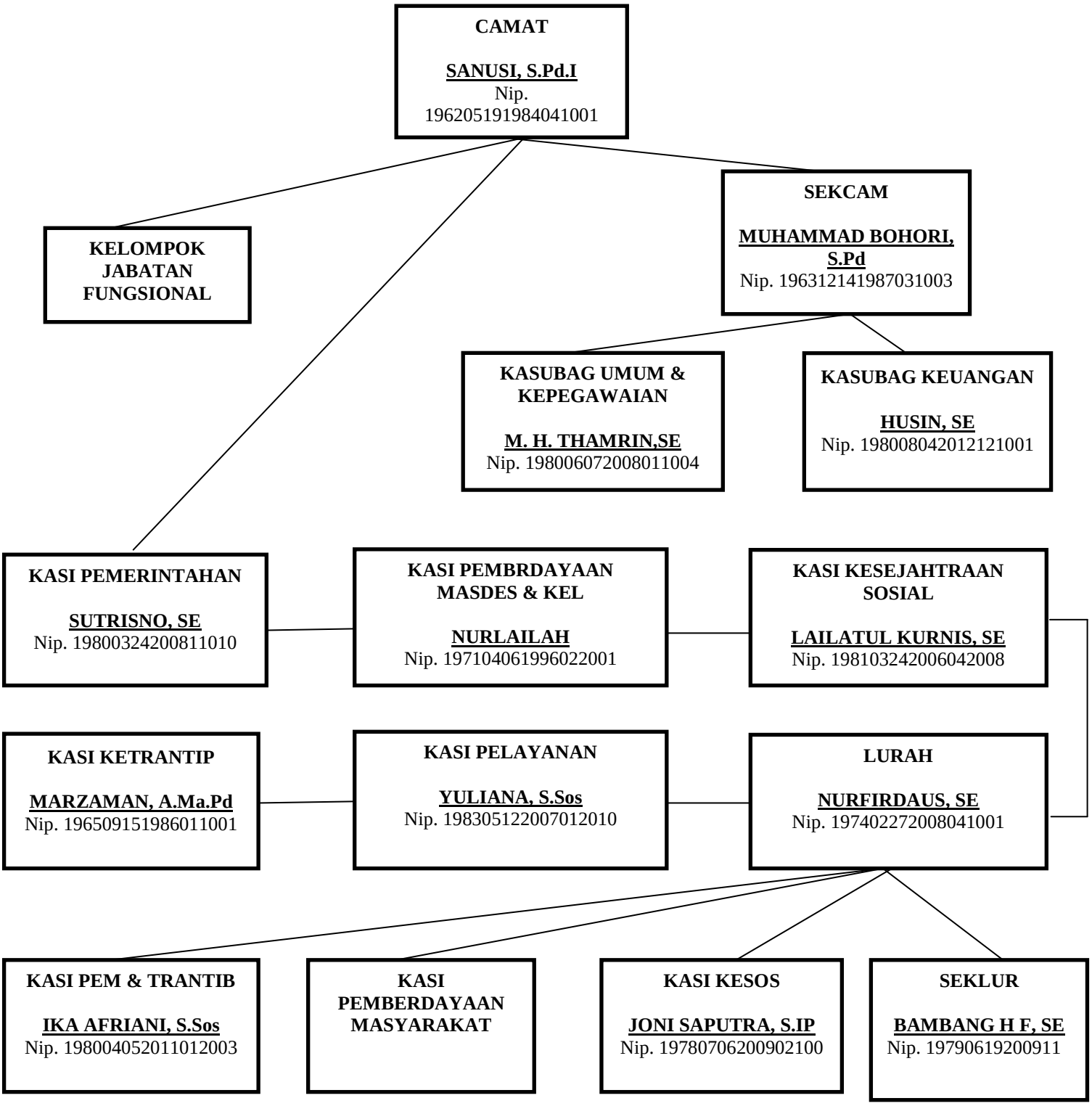

[29]Sumber Data: Dokumentasi Struktur Organisasi Kecamatan Mersam, Tahun 2016

C. Visi dan Misi Kecamatan Mersam

Visi adalah perwujudan yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintahan yang bersangkutan. Sedangkan misi adalah tonggak perencanaan strategis yang sejalan dengan pembentukan tujuan dan sasaran yang perumusannya harus dilakukan secara obyektif dan memberikan peluang untuk dilakukan perubahan disesuaikan dengan tuntutan lingkungan, oleh karena itu misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan terlaksana dengan baik.

a. Visi

Sesuai dengan visi Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari adalah Masyarakat Kecamatan Mersam yang Maju, Adil, dan Sejahtera, Berdasarkan Iman dan Taqwa.

b. Misi

Misi Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan dan ekonomi kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas dan pemahaman dan pengalaman ajaran agama.[30]

D. Keadaan Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Mersam yang terdiri dari 17 Desa dan 1 Kelurahan yang berjumlah 38.660 Jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki: 19.795 Jiwa dan jumlah penduduk perempuan: 18.865 Jiwa.

---

[30] sumber data: Dokumentasi Kecamatan Mersam, Tahun 2016

Selanjutnya mengenai jumlah penduduk secara keseluruhan yang berdasarkan jenjang umur yag telah dirangkum oleh penulis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Atau Usia Dalam Wilayah Kecamatan Mersam[31]

No	Usia (tahun)	Jumlah penduduk
1	0-05 TAHUN (BALITA)	4.213
2	6-17 TAHUN (USIA SEKOLAH)	11.570
3	18-50 TAHUN (DEWASA)	17.765
4	50 DST/LANSIA	5.112
Jumlah		38.660 Jiwa

2. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang mendasar bagi manusia.Berdasarkan perkembangan pendidikan dewasa ini, pendidikan dalam masyarakat terbagi kepada masyarakat yang berpendidikan tinggi, ditandai banyaknya masyarakat yang berkeinginan untuk bersekolah samapai menuju ke jenjang sekolah menengah atau atas keperguruan tinggi. Sarana dan prasarana pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) yang dalam wilayah Kecamatan Mersam

[31]Sumber data: Dokumentasi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur atau Usia dalam Wilayah Kecamatan Mersam, Tahun 2016

Tabel 4

keadaan sarana pendidikan formal dan teaga pengajarnya di wilayah Kecamatan Mersam[32]

No	Sarana pendidikan	Keterangan
1	Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD)	21 Unit
2	Tenaga Pengajar PAUD	52 Orang
3	Taman Kanak-Kanak (TK)	13 Unit
4	Tenaga Pengajar TK	43 Orang
5	Sekolah Dasar (SD)/ MI	32 Unit
6	Guru SD/MI	331 Orang
7	Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ MTs	4 Unit
8	Guru SMP/MTs	93 Orang
9	Sekolah Menengah Atas (SMA)/ MA	2 Unit
10	Guru SMA/MA	69 Orang

Untuk meningkatkan pendidikan keagamaan, khususnya agama Islam dalam upaya peningkatan dan membentuk anak yang bermental dan berbudi pekerti yang tinggi serta memberantas buta huruf aksara terhadap alqur'an, saat ini setiap desa/kelurahan telah didirikan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Madrasah Ibtidaiah atau sekolah sore dan kelompok Pengajian anak-anak antara Maghrib dan Isya' (PAMI), pendidkan Madrasah dan kelompok Remaja Masjid

[32]Sumber data: Dokumentasi Keadaan Saran dan Prasarana Pendidikan Formal dan Tenaga Pengajarnya di Wilayah Kecamatan Mersam, Tahun 2016

dalam wilayah Kecamatan Mersam terdapat kelompok pengajian didesa/kelurahan yang terdiri dari :

Tabel 5

Keadaan Pendidikan Informal di Kecamatan Mersam[33]

No	Jenis pendidikan	Jumlah
1	Jumlah pengajian PAMI	68 Kelompok
2	Julah guru nagji PAMI	72 Orang
3	Julah guru ngaji Madrasah / TPA	120 Orang
4	Jumlah kelompok remaja masjid	18 Kelompok
5	Jumlah anggota remaja masjid	1.200 Orang
6	Jumlah kelompok yasinan	76 Kelompok
7	Jumlah BKMT/ majlis ta'lim dan pengajian	32 Kelompok
8	Jumlah Da'i	18 Orang

E. Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program RASTRA di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan adalah pelaksana Program RASTRA di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

[33]Sumber data: Dokumentasi Keadaan Pendidikan Informal di Kecamatan Mersam, Tahun 2016

2. Tugas

Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program RASTRA di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten/Kota.Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program RASTRA di kecamatan dan desa/kelurahan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan penyaluran RASTRA di kecamatan.
b. Sosialisasi RASTRA di wilayah kecamatan.
c. Pendistribusian RASTRA.
d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RASTRA di desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat.
f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi RASTRA di desa/ 23 kelurahan/pemerintahan setingkat.
g. Pelaporan pelaksanaan RASTRA kepada Tim Koordinasi RASTRA Kabupaten/Kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan

realisasi penyaluran RASTRA dari Pelaksana Distribusi RASTRA kepada KPM.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan

Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Seksi PMD atau Kepala Seksi terkait, serta Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).[34]

F. Susunan Tim Koordinasi dan Monotoring kegiatan pengawasan penyaluran RASTRA dalam Kecamatan Mersam

Tabel 6

Susunan Tim Koordinasi Kecamatan

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tempat
1.	Camat	Penanggung Jawab	
2.	Sekcam	Ketua	
3.	Kasi Kesra	Sekretaris	
4.	Kasi PMD	Perencanaan	
5.	Kasi PEM	Sosialisasi	
6.	KSK	Monotoring	
7.	Staf KESRA	Pelaksanaan Penyaluran RASTRA Kecamatan	
8.	Kasi Kesra	Pelaksana Penyaluran	Kel. Kembang Paseban

[34]Pedoman Umum Beras Sejahtera (RASTRA) tahun 2017, hlm. 23

9.	Masyana	Pelaksana Penyaluran	Desa Kembang Tanjung
10.	Kasi Kesra	Pelaksana Penyaluran	Desa Mersam
11.	Anuar.HS	Pelaksana Penyaluran	Desa Benteng Rendah
12.	M. Safi'ih	Pelaksana Penyaluran	Desa Pematang gadung
13.	Sabrina	Pelaksana Penyaluran	Desa Sengkati Baru
14.	Mahyudin	Pelaksana Penyaluran	Desa Teluk Melintang
15.	Kasi KESRA	Pelaksana Penyaluran	Desa Sengkati Gedang
16.	Rusli	Pelaksana Penyaluran	Desa Sengkati Kecik
17.	Kasi KESRA	Pelaksana Penyaluran	Desa Sungi Puar
18.	Jalaluddin	Pelaksana Penyaluran	Desa Rantau Gedang
19.	Kasi KESRA	Pelaksana Penyaluran	Desa Bukit Harapan
20.	Hendri	Pelaksana Penyaluran	Desa Tapah Sari
21.	Kasi KESRA	Pelaksana Penyaluran	Desa Belanti Jaya
22.	Kasi KESRA	Pelaksana Penyaluran	Desa Bukit Kemuning
23.	Kasi KESRA	Pelaksana Penyaluran	Desa Simp. Rantau Gedang
24.	A. Bakar	Pelaksana Penyaluran	Desa Sengkati Mudo
25.	Kasi Kesra	Pelaksana Penyaluran	Desa Tanjung Putra

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pendistribusian Program Beras Sejahtera (RASTRA) Di Kecamatan Mersam

1. Program Beras Sejahtera (RASTRA)

Secara umum program dapat diartikan sebagai rencana.Program merupakan sistem.Sedangkan sistem adalah suatu kesatuan dari beberapa bagian atau komponen program yang saling kaitmengait dan bekerjasama satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam sistem.Dengan begitu, program terdiri dari komponen yang saling berkaitan dan saling menunjang dalam rangka mencapai suatu tujuan.[35]

Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah, maka diharapkan pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program RASTRA dilakukan diseluruh wilayah di Indonesia dengan berdasarkan pagu RASTRA yang telah ditetapkan pemerintah. Pagu tersebut dilakukan selama satu tahun bergulirnya program RASTRA. Salah satu kecamatan yang mendapatkan jatah beras RASTRA di Kabupaten Batang Hari adalah Kecamatan Mersam, Program RASTRA dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Mersam. Peneliti memfokuskan penelitian pada 3 desa yaitu Desa Pematang Gadung, Desa Sengkati Kecil, dan Desa Simpang Rantau

[35]Arikunto Suharsimi, *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman teoritis praktis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 10

Gedang karna tiga desa tersebut memiliki jumlah kuota penerima RASTRA terbanyak di antara desa/kelurahan lainnya yang terdapat di Kecamatan Mersam.

Program RASTRA adalah program nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Program RASTRA sudah ada sejak tahun 1998, pada tahun ini dikenal dengan operasi pasar khusus (OPK), pada tahun 2002 program ini berubah nama menjadi Program RASKIN, selanjutnya dipertengahan tahun 2015 penamaan program juga berubah yaitu menjadi program RASTRA (beras sejahtera). Program RASTRA merupakan hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dengan jumlah beras 15kg/KK dengan harga tebus beras (HTR) sebesar 1.600,-/kg. Program RASTRA sangat dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu, karna dengan adanya program ini masyarakat bisa mendapatkan beras yang diberikan tiap bulannya dengan harga yang cukup terjangkau bagi masyarakat miskin.[36]

Program RASTRA bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Adapun sasaran Program RASTRA adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/ bulan atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Sedangkan manfaat Program RASTRA adalah sebagai berikut:

---

[36]Wawancara ibuk Masito, Masyarakat penerima Program Rastra di Desa Simpang Rantau Gedang RT 02, pada tanggal 26 mei 2018

(1) Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

(2) Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.

(3) Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.

(4) Stabilisasi harga beras di pasaran.

(5) Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dan menjaga stok pangan nasional.

(6) Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.[37]

2. Mekanisme pelaksanaan program RASTRA

Dalam pelaksanaan program RASTRA diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan program RASTRA. Pedoman umum subsidi RASTRA sebagai panduan pelaksanaan RASTRA untuk tingkat nasional yang di informasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.PEDUM ini di dalamnya berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program RASTRA yang berlaku secara nasional.[38] Berikut mekanisme pelaksanaan program RASTRA:

---

[37] Petunjuk Umum Program Rastra (PEDUM Rastra) tahun 2017, hlm. 12
[38]Ibid, hlm. 31

a) Penetapan pagu RASTRA

Pagu RASTRA adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat RASTRA (KPM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM RASTRA untuk tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota pada tahun tertentu.Penetapan pagu RASTRA di mulai dari tingkat nasional yang merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Selanjutnya penetapan pagu RASTRA untuk tingkat Provinsi yang ditetaptapkan oleh Menteri Sosial.Kebijakan ini di danai oleh oleh APBD sesuai dengan kemampuan.Penetapan pagu RASTRA Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubenur dan mengacu pada pagu RASTRA provinsi yang disampaikan oleh Menteri Sosial.Langkah terakhir yaitu penetapan pagu RASTRA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan/ pemerintah setingkat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.[39]

Penetapan kuota RASTRA ini berskala nasional sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan.Pendataan penerima program RASTRA tahun 2017 Di Kecamatan Mersam berdasarkan hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015.Pendataan tersebut dilakukan oleh petugas BPS berdasarkan data dari aparat pemerintah desa, kemudian Tim BPS melakukan survey ke tiap rumah warga dengan berpatokan dari data tersebut serta di dampingi oleh pihak desa, baik itu ketua RT, Kades, atau aparat pemerintah setempat untuk menentukan warga miskin yang layak mendapatkan bantuan program RASTRA. Koordinasi

[39]Ibid, hlm. 35

ini dilakukan oleh BPS karena pihak aparat desa lebih memahami kondisi warga masyarakat mereka sehingga pengetahuan terhadap kondisi keluarga miskin dapat diperoleh secara mendalam. Survey ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat tersebut memenuhi kriteria dari penerima program RASTRA. Untuk penerima program RASTRA itu berada pada desil ke 4 yaitu masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah. Setelah survey di tiap-tiap Desa selesai, selanjutnya data hasil survey tersebut diolah oleh Tim TMP2K pusat bagian ekonomi kemudian hasil data tersebut menjadi data penerima program rastra.[40]

Setelah mengetahui jata alokasi RASTRA yang diterima dan nama-nama penerima RASTRA melalui SK Walikota kepada Camat yang di teruskan ke Lurah/Kepala Desa, kemudian data tersebut di musyawarahkan dalam musyawarah kelurahan (MUSKEL)/ musyawarah desa (MUSDES) sebagai media verifikasi data tanpa mengubah jumlah KPM setiap Desa/Kelurahan. Musyawarah desa (MUSDES) adalah forum pertemuan musyawarah di desa yang melibatkan aparat desa, kelompok masyarakat desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan perwakilan keluarga penerima manfaat RASTRA. Dalam pelaksanaan MUSDES harus melibatkan unsur: Kecamatan setempat, kepala desa/perangkat yang mengurusi RASTRA, BPD/LPMD, TKSK, tokoh masyarakat/tokoh agama, RT/RW/Kadus, dan perwakilan KPM.[41] Perubahan/pemberahuan Daftar Penerima Manfaat (DPM) RASTRA dilakukan melalui MUSDES/MUSKEL pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan program RASTRA. Melalui MUSDES/MUSKEL ditetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan

[40]Wawancara Bapak Sopyan Tim Koordinasi Penyaluran Program Rastra Di Kecamatan Mersam, pada tanggal 19 mei 2018

[41]Ibid, hlm. 8

keluarga pengganti/masuk ke dalam DPM. Seperti yang dijelaskan oleh Ibuk Toyibah:

> "Data penerima bantuan beras ini kan di tentukan oleh pihak pusat, jadi besar kemungkinan data itu tidak vailed. Maksudnya kan pasti ada masyarakat yang mampu tetapi namanya terdaftar dalam DPM-1, sedangkan masyarakat yang kami anggap berhak menerima bantuan malah tidak terdaftar dalam DPM-1 tadi. mako caro untuk menyelesaikan masalah itu tadi bisa dengan melakukan musdes, tapi dengan satu syarat kami tidak boleh menambah kuota penerima lebih dari yang ditetapkan, hanya saja nama-nama nya tadi boleh diganti".[42]

Dengan mengadakan MUSDES/MUSKEL Aparat Pemerintah setempat dapat melakukan vertifikasi data penerima program RASTRA dan untuk Keluarga peserta program keluarga harapan (PKH) harus mendapatkan RASTRA dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM RASTRA. KPM RASTRA yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang pindah alamat keluar desa/kelurahan/pemerintah setingkat, KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal, dan KPM yang dinilai oleh MUSDES/MUSKEL sudah tidak layak sebagai penerima RASTRA, KPM RASTRA yang kepala keluarganya meninggal tetap memperoleh haknya. RASTRA diberikan kepada pasangan kepala keluarga atau anggota keluarga lain tanpa merubah nama DPM. Keluarga yang dinilai layak sebagai KPM pengganti untuk menggantikan KPM pada butir 4 (empat) di atas diprioritaskan kepada keluarga miskin/kurang mampu dengan kriteria antara lain sebagai berikut: jumlah anggota keluarga besar, terdapat balita dan anak usia sekolah, lansia, penyandang disabilitas, kepala keluargamya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah

[42] Wawancara Ibu Toyibah Sebagai Tim Koordinasi Penyalur Program Rastra di Desa Sengkati Kecil pada tanggal 23 mei 2018

dan/tidak tetap.[43]Daftar akhir KPM RASTRA, termasuk perubahannya bila dilakukan mudes/muskel, dituangkan kedalam DPM-1 RASTRA yang menjadi dasar penyaluran RASTRA di desa/kelurahan.Setelah DPM-1 dihasilkan di tingkat desa/kelurahan, penyaluran RASTRA dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan.

Dari pengamatan penulis di lapangan, dalam proses pendistribusian RASTRA di tiap titik distribusi di wilayah Kecamatan Mersam mengalami persoalan karena jumlah kuota penerima bantuan program RASTRA yang selalu berkurang. Jumlah kuota penerima dalam program ini menjadi masalah yang selalu ditemui tiap tahunnya, karna jumlah kuota dari tahun ke tahun selalu mengalami pengurangan sedangkan jumlah penduduk yang berhak mendapatkan bantuan itu terbilang banyak sehingga menyebabkan pembagian yang tidak bisa merata.[44]

Dengan berkurangnya jumlah kuota penerima program RASTRA setiap tahunnya maka menyebabkan adanya sejumlah warga di wilayah Kecamatan Mersam yang merasa dirinya miskin tapi tidak mendapatkan jatah program RASTRA. Sehingga muncul rasa kecewa dan iri setiap kali distribusi beras dilaksanakan di Kecamatan Mersam. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Pematang Gadung:

> ”Banyak sekali masyarakat yang mendatangi kantor untuk melakukan protes atau sekedar untuk menanyakan mengapa mereka tidak mendapat jatah beras untuk tahun ini. Salah satu cara kami yaitu dengan menjelaskan bahwa data setiap tahun itu berbeda, dan data itu di berikan dari atas bukan kami aparat desa yang menetukan siapa yang wajib menerima jatah beras

---

[43]Ibid. hlm. 36

[44] Wawancara Bapak Budi Pengurus Penyaluran RASTRA Di Desa Simpang Rantau Gedang, pada tanggal 26 mei 2018.

tersebut, jadi memang banyak masyarakat yang tidak terdaftar. Sebagian masyarakat ada yang percayo,tapi ado juga yang masih nak nuntut untuk dikasih jatah beras RASTRA ini tadi, yang namonyo dapat beras murah macam itu jelas banyak masyarakat yang menuntut."[45]

Banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan RASTRA ini jelas mengakibatkan polemik ditengah masyarakat. Untuk penanganan masalah tersebut biasanya diserahkan kepada pihak kelurahan atau RT/RW, yaitu melalui sistem pembagian rata dengan cara membagikan beras separuh perorang atau dengan sistem bergulir, misalnya untuk bulan ini warga yang terdaftar mendapatkan jatah beras, dan untuk bulan selanjutnya jatah beras diberikan pada masyarakat yang tidak mampu yang terdapat didesa/kelurahan tersebut berdasarkan kesepakatan antara RT dan warga penerima manfaat program RASTRA dengan bukti menandatangani matrai 6000. Untuk masalah pembayaran itu ditanggung oleh masing-masing warga sesuai dengan jumlah beras yang diterima. Jadi semua itu tergantung kesepakatan dari warga, baik dari warga yang terdaftar sebagai KPM program, maupun warga yang tidak terdaftar sebagai KPM program RASTRA.

Setelah penetapan pagu terlaksana maka diadakan sosialisasi atau penyampaian program dimana kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai dengan kelompok sasaran. Sosialisasi program RASTRA ini dilakukan pada awal tahun yaitu awal ditetapkannya jumlah KPM. Sosialisasi ini dalam bentuk rapat, dalam rapat menjelaskan mengenai sasaran program, tujuan tujuan program, sejarah program, mekanisme

[45] Wawancara Bapak Tarmud Mursidi Kepala desa Pematang Gadung , pada tanggal 21 mei 2018

penyaluran program dari tingkat pusat sampai ke masyarakat, dan menjelaskan mengenai jumlah alokasi beras serta nama-nama yang berhak mendapatkan program RASTRA.[46]

Sosialisasi program sangat penting dilakukan, dengan adanya sosialisasi akan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program RASTRA. Tetapi yang peneliti temukan pada saat penelitian, masih banyaknya masyarakat penerima program yang belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai program RASTRA tersebut. Sehingga untuk masalah sebutan nama program ini masih banyak masyarakat yang tidak tau sama sekali, masalah penamaan program yang melekat dalam masyarakat yaitu bantuan beras miskin. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program ini sangat berdampak terhadap penyaluran program tersebut. Pada saat dilakukannya rapat sosialisasi oleh aparat desa setempat, masyarakat penerima program banyak yang tidak datang, bahkan tidak tau menau dengan diadakannya rapat sosialisasi tersebut. Padahal melalui rapat ini, masyarakat bisa mengetahui informasi yang jelas tentang program RASTRA serta jumlah kuota beras dan nama-nama penerima jatah beras tersebut.Berikut jumlah penerima manfaat program RASTRA dari tahun 2015-2017 di Kecamatan Mersam:

[46]Wawancara dengan Bapak Sopian, pada tanggal 19 mei 2018

Tabel 7

Jumlah Penerima Program RASTRA

NO	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Penerima		Jumlah/Kg	
		2015/2016	2017	2015/2016	2017
1	Kelurahan Kembang Paseban	90	87	1.350	1.305
2	Desa Mersam	145	42	2.175	630
3	Desa Kembang Tanjung	158	88	2.370	1,320
4	Desa Benteng Rendah	29	42	435	630
5	Desa Pematang Gadung	191	117	2.865	1.755
6	Desa Sengakati Baru	90	88	1.350	1.320
7	Desa Teluk Melintang	26	33	390	495
8	Desa Sengkati Gedang	70	93	1.050	1.395
9	Desa Sengkati Kecil	196	184	2.250	2.760
10	Desa Sungai Puar	75	51	810	765
11	Desa Rantau Gedang	130	95	1.950	1.425
12	Desa Bukit Harapan	17	34	255	510
13	Desa Belanti Jaya	21	32	315	480
14	Desa tapah Sari	61	54	915	810
15	Desa Bukit Kemuning	9	18	135	270
16	Desa Simpang Rantau Gedang	178	126	2.670	1,890
17	Desa Sengkati Mudo	46	55	690	825
18	Desa Tanjung Putra	23	20	345	300
	Jumlah	1.569	1,259	22,320	18.885

b) Penyaluran program RASTRA

Penyaluran bantuan RASTRA dapat dilakukan berdasarkan data yang telah ditetapkan dari hasil tim BPS berdasarkan data yang diperoleh dari tiap-tiap desa/kelurahan dari hasil MUSDES/MUSKEL. Berikut mekanisme penyaluran program RASTRA dari pihak atas sampai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) :

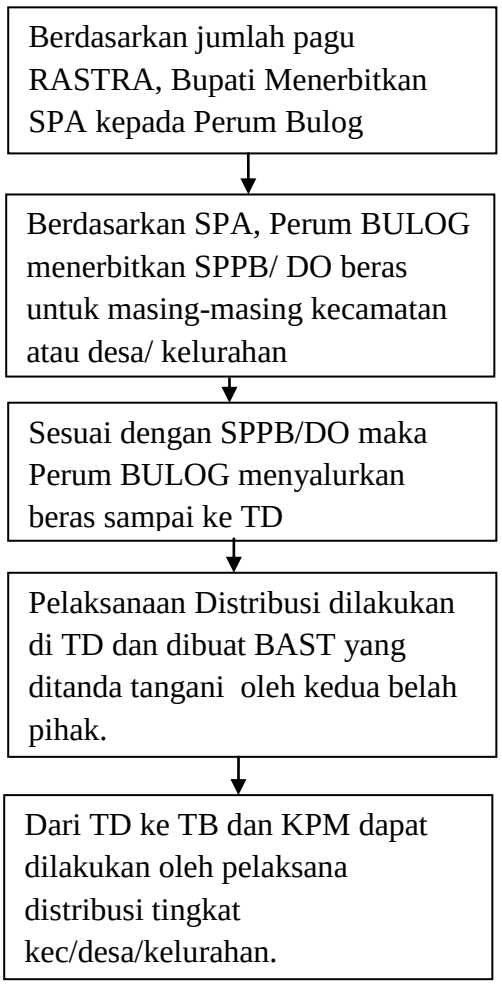

Sumber data PEDUM RASTRA Tahun 2017.

Penyaluran program RASTRA dapat dimulai apabila pagu atau kuota RASTRA telah ditetapkan, kemudian melakukan koordinasi dengan kabupaten untuk mengirimkan SPA kepada perum Bulog, ketika SPA sudah dikirim dan

berdasarkan SPA tersebut perum Bulog langsung menyalurkan ke kecamatan, kemudian dari kecamatan itu langsung menyalurkan ke tiap desa/kelurahan. Setelah beras sampai di desa, maka setiap Ketua RT mengambil jatah berasnya masing-masing sesuai dengan kuota yang telah di sepakati, kemudian masyarakat yang sebagai penerima RASTRA mengambil jatah berasnya ke rumah tiap-tiap Ketua RT.[47] Pendistribusian RASTRA dilakukan dengan memberikan beras kepada masyarakat yang terdaftar sebagai DPM (daftar penerima manfaat) dengan jumlah beras 15/kg per bulan dalam 12 kali setahun dengan harga 1.600/kg. Namun peneliti yang temukan saat penelitian, beras yang seharusnya di berikan satu bulan sekali sering mengalami keterlambatan, padahal masyarakat sudah mengharapkan agar beras RASTRA segera dikirim dan dibagikan, karena mereka sangat membutuhkannya untuk menopang kebutuhan pangan mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengiriman RASTRA ini mengalami penundaan atau keterlambatan. Dari pengamatan yang dilakukan, di Kecamatan Mersam ada pengiriman jatah RASTRA sebanyak tiga bulan sekali , Seperti yang diungkapkan oleh pelaksana program RASTRA di Desa Sengkati Kecil:

> ”Pembagian beras kepada masyarakat di sini pada awal berjalannya program itu diberikan tepat waktu, yaitu satu bulan sekali.Tetapi lebih sering beras itu datang 3 bulan sekali.Misalnya untuk bulan januari-februari beras tidak datang, maka beras datang bulan maret.Nah jadi jatah beras yang diterima masyarakat tetap untuk setiap bulannya tapi datang beras nya yangmengalami keterlambatan”.[48]

Terlambatnya waktu pengiriman beras itu disebabkan karna pihak desa/kelurahan yang lambat dalam membayar uang HTR pada pihak kecamatan,

---

[47] Wawancara Bapak Sopyan, pada tanggal 19 mei 2018
[48] Wawancara Ibu Toybah, pada tanggal 23 mei 2018

untuk di transferkan ke perum Bulog.Lambatnya pembayaran ini disebabkan oleh masyarakat yang pada saat beras datang, ada sebagian masyarakat yang belum mempunyai uang untuk membayar HTR beras tersebut, sehingga menyebabkan beras datang 3 bulan sekali.Karna pengiriman beras dapat dilakukan apabila uang HTR telah dikirim dari pihak kecamatan, baru beras dapat dikirim oleh perum bulog.[49] Untuk informasi pengiriman beras, ketua tim koordinasi RASTRA Kecamatan menyampaikan ke lurah yang diteruskan ke RT/RW untuk disampaikan kepada KPM untuk memberitahu hari kedatangan beras sehingga KPM dapat mempersiapkanuang pembayaran sebelum beras datang. Sebelum kedatangan beras tersebut, perwakilan RT/RW mendatangi KPM untuk meminta pembayaran atas jatah beras RASTRA yang akan mereka terima, atau KPM membayar langsung ke ketua RT/RW. Tetapi ada juga ketua RT yang menalangi uang tebusan beras warga, dengan alasan supaya uang beras dapat langsung disetorkan kepada pihak kecamatan untuk di transfer ke rekening BULOG, sehingga dapat mempercepatkan datangnya beras.

Dalam pengamatan peneliti, pada waktu pendistribusian beras, seringkali tidak didampingi oleh petugas Bulog.Hal ini dikarenakan pihak Bulog sudah mempercayakan pelaksanaan pendistribusian beras RASTRA kepada aparat Kecamatan, untuk BAST beras RASTRA dititipkan melalui Tim Koordinasi RASTRA Kecamatan untuk diserahkan kepada pihak desa/kelurahan untuk ditandatangani.Setelah pelaksanaan distribusi beras di desa/kelurahan selesai, selanjutnya beras dapat dibawa pulang oleh masing-masing perwakilan ketua RT

[49] Wawancara Bapak Agus Sebagai TKSK Kecamatan Mersam pada tanggal 19 mei 2018

tiap-tiap desa. Untuk biaya angkutnya sendiri sesuai dengan kesepakatan antara warga dengan perwakilan RT yang mengambilkan beras, dan bahkan banyak juga perwakilan RT yang secara sukarela mengambilkan beras RASTRA untuk masyarakat tanpa ada pungutan biaya tambahan.Hal inilah yang menyebabkan harga tiap-tiap beras itu berbeda kadang tidak sesuai dengan PEDUMyang telah ditetapkan.Dimana untuk 15/kg masyarakat dikenakan biaya sejumlah Rp.24000, ada juga yang membayar Rp.30000.[50]

Mengenai masalah HTR yang berbeda-beda yang di terima oleh KPM pihak Tim Koordinasi Kecamatan tidak berani untuk ikut campur.Biasaya itu merupakan kesepakatan antar RT dan KPM itu sendiri. Mungkin ada alasan tertentu dari Ketua RT tersebut, misalnya apakah termasuk transfortasi dalam pengangkutan beras, atau hal yang lain.[51]Selama masa penelitian, mengenai kualitas beras yang diterima masyarakat itu tidak selalu baik, terkadang ditemukan kutu beras, terkadang juga menimbulkan bau apek, namun ada juga yang kualitas berasnya baik, tapi yang jelas beras yang masyarakat terima masih bisa untuk di makan sehari-hari.[52]

Di jelaskan didalamPEDUM RASTRA 2017 bahwa penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan.Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak

---

[50] Wawancara Ibu Mina, Sebagai KPM di Desa Pematang Gadung RT 11, pada tanggal 21 mei 2018

[51] Wawancara Bapak Sopyan, pada tanggal 19 mei 2018

[52] Wawancara Ibu Khoryah, Sebagai KPM di Desa Sengkati Kecil Rt 09, pada tanggal 23 mei 2018

dasarnya. Berdasarkan penelitian bahwa di Kecamatan Mersam bantuan beras tersebut telah diberikan kepada keluarga miskin yang terdaftar sebagai penerima manfaat program RASTRA. Beras yang didapatkan masyarakat di Kecamatan Mersam dimanfaatkan untuk dimakan sehari-hari. Tetapi juga terdapat sebagian warga yang menjual hasil dari bantuan beras tersebut, karna beras yang datangnya tiga bulan sekali membuat masyarakat berat dalam menebus uang HTR, maka dari itu dengan cara menjual separuh beras yang didapat kepada masyarakat lain yang ingin membelinya.[53]

Selama masa penelitian tidak ditemukannya sanksi-sanski yang masyarakat terima apabila ketahuan menjual beras RASTRA tersebut, karna jika beras sudah berada di tangan KPM, itu berarti sudah menjadi milik KPM tersebut.

B. Kendala dan Pendukung dalam pendistribusian program RASTRA di Kecamatan Mersam

Lama masa berjalan suatu program belum memastikan bahwa program bebas dari yang namanya masalah atau kendala. Program RASTRA merupakan program yang sudah ada semenjak tahun 1998 sampai sekarang.Selama masa penelitian banyak sekali kendala-kendala dalam pelaksanaan program RASTRA yang peneliti temukan. Masalah pertama yang selalu timbul yaitu mengenai pendataan penerima program RASTRA. Jumlah data penerima program yang setiap tahun mengalami perubahan, sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang berburuk sangka terhadap aparat pemerintah setempat. Berkurangnya jumlah KPM program RASTRA dari tahun ke tahun jelas

[53] Wawancara Bapak Jakar, Sebagai KPM di Sengkati Kecil Rt 08, pada tanggal 24 mei 2018

mempengaruhi dalam pendistribusian, yaitu jumlah beras yang masyarakat terima tidak akan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sebanyak 15kg/bulan. Data penerima RASTRA yang berkurang tiap tahun merupakan masalah yang dibilang fatal, sehingga dapat menyebabkan tujuan dari program ini tidak tercapai, karna bantuan diberikan tidak bisa tepat sasaran, sehingga masih banyaknya masyarakat yang tidak terjaring sebagai penerima program RASTRA. Bagi masyarakat yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mereka berhak untuk mendapatkan bantuan program RASTRA. Bagi penelliti ini menjadi kendala dalam pemerataan bantuan RASTRA karna dengan jumlah kuota yang selalu berkurang, dan ketetapan yang menjelaskan bahwa masyarakat penerima program PKH tidak bisa dikeluar dari daftar penerima RASTRA ini jelas akan memperbanyak masyarakat yang tidak terjaring. Aparat pemerintah kecamatan/desa/keluarahan, mereka sangat berharap jumlah penerima RASTRA ini bisa bertambah setiap tahun nya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Budi:

> ”Jumlah kuota dalam program ini menjadi masalah yang di temui tiap tahunnya, karna jumlah kuota itu makin tahun makin berkurang.Seperti di desa kami ini. Desa kami kan merupakan wilayah desa yang luas, dan jumlah penduduk miskinnya juga banyak, sedangkan jumlah kuota yang kami terima itu sedikit,jadi pembagian itu tidak bisa merata. Sedangkan masyarakat yang membutuhkan itu memang banyak.Dahulu kami pernah mengirim permintaan penambahan kuota program RASTRA untuk desa Simpang Rantau Gedang, namun tidak ada jawaban tetap saja penerima RASTRA selalu mengalami pengurangan”.[54]

Selain masalah pendataan, masalah selanjutnya yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang program RASTRA. Karna yang peneliti

[54] Wawancara Bapak Budi, pada tanggal 26 mei 2018.

temukan dalam penelitian yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak tau tentang program ini, dimulai dari sejarah program RASTRA, tujuan dan sasaran program, mekanisme penyaluran dan mengenai jumlah data yang diterima dari tahun ke tahunnya. Ini dikarnakan kurangnya diadakan sosialisi oleh aparat kecamatan/desa kepada keluaraga penerima manfaat (masyarakat), dan juga kurangnya ketidak ikut sertaan masyarakat dalam menghadiri rapat sosialisasi program RASTRA. Kebanyakan masyarakat tau mengenai program RASTRA hanya melalui masyarakat yang satu dengan yang lain, itu pun hanya sekedar datangnya beras.

Selanjutnya kurangnya pengawasan dari aparat desa setempat dan pihak pemerintah pusat terhadap pendistribusian RASTRA, sehingga menimbulkan masalah saat pendistribusian.Salah satunya mengenai adanya harga tambahan yang masyarakat terima.Dan untuk masalah waktu pemberian beras itu juga sering mengalami keterlambatan. Seperti yang diungkapkan oleh pelaksana program RASTRA di desa sengkati kecil:

> ”Pembagian beras kepada masyarakat di sini pada awal berjalannya program itu diberikan tepat waktu, yaitu satu bulan sekali.Tetapi pernah juga beras itu datang 3 bulan sekali.Misalnya untuk bulan januari-februari beras tidak datang, maka beras datang bulan maret.Nah jadi jatah beras yang diterima masyarakat tetap untuk setiap bulannya tapi datang beras nya yang lambat”.[55]

Hal ini tidak akan terjadi jika pihak pusat lebih tegas dalam memantau pelaksanaan program RASTRA ditingkat kecamatan/desa/kelurahan. Selain itu penyebab pendistribusian RASTRA juga diakibatkan oleh masyarakat setempat

[55] Wawancara Ibu Toybah, pada tanggal 23 mei 2018

yang menuntut untuk mendapatkan bantuan beras tersebut, walaupun secara ekonomi mereka termasuk keluarga yang mampu, sehingga menyebabkan pendistribusian program RASTRA kurang tepat dan tidak efektif.Sehingga menyebabkan berjalannya program lebih pada kearifan (kemurahan hati) ketimbang prosedur.

Adapun faktor pendukung yang dilakukan untuk mencapai tujuan program RASTRA dapat terlaksana, berdasarkan hasil penelitian yaitu kuota data penerima program RASTRA harus lebih banyak supaya program benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan, dan tujuan program bisa tercapai.Karna jumlah kuota data penerima yang selalu berkurang, membuat aparat desa kualahan dalam memecahkan masalah tersebut.Maka salah satu faktor pendukung yang aparat pemerintah kecamatan/desa/ kelurahan melakukan sistem bagi rata atau bergulir kepada masyarakat yg berhak menerima RASTRA. Cara seperti ini merupakan salah satu cara mereka dalam menyingkapi kurangnya data yang selalu terjadi dalam penyaluran RASTRA.Jumlah kuota data yang selalu berkurang maka megharuskan aparat pemerintah setempat pada saat pendataan penerima RASTRA harus benar-benar berdasarkan aturan yang ditetapkan supaya program RASTRA dapat tersalurkan kepada yang benar-benar berhak. Perbaikan terhadap data penerima manfaat program RASTRA sangat dibutuhkan agar efektifitas program dapat tercapai perbaikan data KPM dimulai dari tingkat desa. Aparat pemerintah setempat harus benar-benar melakukan pendataan sesuai dengan kriteria ketetapan yang diberikan oleh tim BPS. Dimana tingkat kemiskinan penerima manfaat program RASTRA yaitu berada di desil 4,

tingkatan ini merupakan masyarakat yang ekonominya menengah kebawa. Berikut desil (jenjang) ekonomi penerima program pemerintah :

Tabel 8

Tingkatan Penerima Program Pemerintah

No	Angka	Tingkat Kemiskinan
1	0%-10%	Penerima program PKH.
2	11%-20%	Penerima Kartu Indonesia Sehat
3	21%-30%	Penerima Kartu Indonesia Pintar
4	31%-40%	Penerima Program beras sejahtera (rastra)

Penerima program RASTRA berada di desil ke 4. Dimana desil 4 ini merupakan masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah, desil 4 ini merupakan kriteria terakhir, jika sudah melewati desil ini masyarakat tersebut sudah dianggap mampu perekonominya. Dengan melakukan perbaikan data diharapkan data penerima program RASTRA benar-benar masyarakat yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Perbaikan ini dilakukan supaya untuk tahun kedepannya pembagian program rastra bisa terlaksana lebih baik dan diharapkan data program rastra benar-benar berisikan data masyarakat miskin untuk pembagian bantuan RASTRA, supaya tidak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat.

Faktor pendukung selanjutnya yaitu meningkatkan kerja sama antara pihak kecamatan dan aparat pemerintah desa/kelurahan dalam pendistribusian RASTRA supaya pendistribusian program RASTRA dapat terlaksana dengan

lancar, dan memberikan kepuasan pada masyarakat penerima RASTRA, yang peneliti temukan saat menjalani penelitian, kerja sama antar aparat pemerintah setempat ini bisa dikatakan cukup baik dalam melaksanakan program RASTRA, seperti yang dilakukan aparat pemerintah desa yang selalu mengirim hasil pemantaun program ke pihak kecamatan. Kemudian pihak kecamatan juga melakukan pelaporan setiap bulan ke pihak pusat untuk membuktikan bahwa penyaluran program telah terlaksana sebagaimana mestinya. Kerja sama antar aparat setempat ini hanya perlu ditingkatkan agar program bisa 100% terlaksana dengan baik, salah satunya dalam hal ketepatan penyetoran HTR dari aparat pemerintah desa/kelurahan kepada pihak kecamatan, agar uang HTR tersebut dapat langsung ditransferkan kepada Perum Bulog supaya tidak menyebabkan datangnya beras yang selalu mengalami penundaan. Selain itu juga meningkatkan pengawasan yang dilakukan pihak pusat dalam pendistribusian RASTRA di tingkat kecamatan, desa/kelurahan , sampai kepada KPM RASTRA. sehingga masalah-masalah yang timbul dalam pendistribusian RASTRA bisa diselesaikan demi kelancaran program RASTRA. Seperti ketidakhadiran pihak Perum Bulog dalam penyaluran RASTRA sampai.Selain dari pihak pemerintah, faktor pendukung keberhasilan program RASTRA yaitu kesadaran dari masing-masing pihak, baik itu pihak aparat pemerintah setempat ataupun kesedaran di masyarakat.Kesadaran ini diperlukan agar setiap tugas dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Agar tidak adanya lagi permasalahan yang ditemukan, baik itu masalah perbedaan HTR, jumlah beras yang masyarakat terima, dan siapa saja yang menerima program RASTRA.

Kesadaran masing-masing pihak sangat dibutuhkan supaya program RASTRA dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

C. Evaluasi Program RASTRA di Kecamatan Mersam

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas.Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai jenis program.Semua program tersebut perlu dievaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang ditetapkan.Evaluasi program adalah metode sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program.[56]

Dalam penelitian Evaluasi Program RASTRA di Kecamatan Mersam, peneliti menggunakan teori menurut Wiliam Dunn tentang evaluasi kebijakan.Dijelaskan bahwa ada enam kriteria dalam evaluasi yaitu efektifitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketetapan.

a) Efektivitas

Pada dasarnya untuk menentukan keberhasilan suatu program yang dilaksanakan tidak terlepas dari kata efektivitas, karena efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Untuk menentukan efektivitas program RASTRA di Kecamatan Mersam dapat diketahui dari 6T yaitu, tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, tepat jumlah dan tepat administrasi.

---

[56] Wirawan, *Evaluasi: teori, model, standar, aplikasi, dan profesi*, (Jakarta: Rajawali pers,2012),hlm.17.

1. Tepat sasaran

Seperti yang disebutkan didalam PEDUM RASTRA bahwah sasaran program RASTRA adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/bulan atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Program RASTRA diberikan kepada KPM yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat RASTRA (DPM-1). Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pemberian RASTRA sudah diberikan pada keluarga yang benar-benar terdaftar sebagai penerima program RASTRA tersebut, artinya pembagian RASTRA sudah dikatakan tepat sasaran hanya saja jumlah kuota yang terbatas menyebabkan pembagian bantuan beras belum sepenuhnya diberikan secara tepat sasaran seperti yang diharapkan dalam program tersebut.

2. Tepat jumlah

Berdasarkan PEDUM RASTRA 2017, jumlah beras yang diterima kpm sebanyak 15kg yang diberikan teratur setiap bulannya.Namun yang peneliti temukan dilapangan mengenai jumlah beras yang warga terima itu tidak menentu. Pengurangan ini terjadi karna pembagian merata yang dilakukan pihak ketua RT terhadap masyarakat yang berhak tetapi tidak terdaftar didalam DPM program RASTRA. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka untuk tepat jumlah beras yang masyarakat terima di Kecamatan Mersam belum dikatakan tepat jumlah sesuai dengan PEDUM RASTRA 2017.

3. Tepat harga

HTR (harga tebus RASTRA) merupakan biaya yang harus dibayar oleh keluarga penerima manfaat program RASTRA dalam pengambilan jatah beras yang diberikan.Sesuai dengan PEDUM RASTRA 2017, harga yang dibebankan kepada kpm adalah 1.600/kg.Dalam penelitian, ditemukan masalah harga yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.Dari hasil wawancara kepada masyarakat penerima program RASTRA menjelaskan kalau untuk harga RASTRA yang mereka terima harganya tidak tetap.Ada yang menyebutkan untuk 1/kg beras RASTRA dibayar Rp.2000/kg, ada juga yang membayar Rp.1800/kg beras yang mereka terima. Walaupun perbedaan HTR tidak membuat mereka protes, tetapi ini jelas menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan di dalam PEDUM RASTRA 2017 yang menjadi acuan dalam penyaluran program RASTRA. Padahal untuk biaya penyaluran RASTRA itu sudah dibiayai oleh APBD, akan tetapi tetap saja sebagian pihak menambahkan biaya tebus HTR dengan alasan biaya transportasi penyaluran RASTRA. Jadi, untuk tepat harga program RASTRA diKecamatan Mersam belum dikatakan tepat HTR yang masyarakat terima.

4. Tepat waktu

Bentuk bantuan program RASTRA yaitu menyalurkan beras kepada warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat yang berikan setiap 1 bulan sekali dengan jumlah beras 15kg.Selama masa penelitian ditemukan bahwa untuk waktu datangnya beras sering mengalami keterlambatan.Keterlambatan datangnya beras ini menjadi keluh kesah masyarakat, karna jatah beras ini sangat

mereka butuhkan.Sesuai dengan pernyataan responden, bahwa keterlambatan datangnya beras yang mereka terima paling lama sampai tiga bulan sekali. Memang masalah ini bersumber dari masyarakat itu sendiri karna ada sebagian masyarakat yang tidak bisa menebus uang HTR saat diberitahukan beras akandikirim.Tetapi keterlambatan datangnya beras itu juga disebabkan oleh pihak aparat pemerintah setempat yang tidak tegas dalam menanggulangi masalah ini.Jadi, untuk tepat waku datangnya beras di Kecamatan Mersam belum dapat dikatakan tepat waktu.

5. Tepat kualitas

Dalam penelitian, masih ditemukannya responden masyarakat yang kurang puas terhadap kualitas beras yang mereka terima, walaupun sebernanya masih layak untuk mereka komsumsi.Kualitas beras yang mereka terima biasanya pecah-pecah, dan sedikit berbau, tetapi masih layak untuk dikonsumsi.Jadi, untuk indikator tepat kualitas, Program RASTRA di Kecamatan Mersam belum bisa dikatakan tepat kualitas.

6. Tepat administrasi

Tepat administrasi bisa dilihat dari terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu. Administrasi RASTRA harus diselesaikan pada satu hari atau pada saat hari pelaksanaan distribusi RASTRA itu juga, yang dimaksud disini yaitu setelah RASTRA didistribusikan tugas pelaksana distribusi RASTRA desa untuk menyetorkan uang hasil penjualan beras kepada pihak Kecamatan untuk ditransferkan langsung ke rekening Bulog. Berdasarkan hasil wawancara peneliti saat masa penelitian, masalah admistrasi masih

menjadisalahsatu kendala dalam penyaluran RASTRA.Ini karna, lambatnya setoran dari desa ke kecamatan membuat pihak kecamatan kualahan dalam mengumpulkan hasil pembayaran RASTRA untuk ditransferkan pada pihak bulog. Keterlambatan admistrasi ini membuat lambatnya beras yang akan kpm terima.

Berdasarkan enam indikator tersebut, dapat diketahui kendala-kendala dalam penyaluran program RASTRA. Secara umum tujuan program RASTRA adalah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk meringankan beban pengeluaran dalam pemenuhan pangan, sehingga diharapkan tidak ada masyarakat miskin yang tidak terpenuhi kebutuhan pangannya.Berdasarkan indikator 6T tersebut dan menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa program RASTRA di Kecamatan Mersam belum sepenuh nya menggambarkan efektivitas pelaksanaan.Hal ini dikarenakan masih ditemukannya kendala-kendala dalam penyaluran program RASTRA yang membuat program tidak sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang ditetapkandidalam PEDUM RASTRA 2017.Banyaknya kendala-kendala dalam penyaluran program RASTRA, salah satunya yaitu mengenai pendataan penerima program yang tidak *failed*. Karna Data penerima RASTRA 2017 merupakan data BPS tahun 2015, jadi ketika data digunakan ditahun 2017 jelas data tersebut tidak *failed* karna banyaknya perubahan ekonomi yg terjadi dimasyarakat tersebut. Masyarakat yg dahulu kurang mampu, maka di tahun 2017 sudah dikategorikan mampu.Sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang berhak tidak terdaftar sebagai penerima program RASTRA.

b) Efesiensi

Efesiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas.Berdasarkan kiteria evaluasi menurut Wiliam Dunn, untuk kriteria efesiensi dapat diketahui dengan melihat seberapa banyak usaha yang diperlukan dalam mencapai hasil yang di inginkan.Agar efesiensi program RASTRA dapat tercapai, maka aparat pemerintah setempat melakukan usaha-usaha dalam meningkatkan efesiensi program.Berdasarkan penelitian di lapangan, dalam meningkatkan efesiensi program RASTRA pihak aparat pemerintah setempat melakukan MUSDES/MUSKEL untuk verfikasi data penerima manfaat program RASTRA. Dengan MUSDES/MUSKEL bisa merubah nama-nama masyarakat yang sudah mampu untuk diganti dengan nama-nama masyarakat yang tidak mampu sebagai penerima program RASTRA. Usaha ini jelas memberikan dampak yang positif dalam penyaluran RASTRA, karna dengan adanya verfikasi data ditingkat kecamatan/desa/kelurahan itu bisa menjaring nama-nama warga miskin yang tidak terdaftar dalam DPM-1.Selain itu, aparat pemerintah setempat juga menerapkan sistem bagi rata atau bergulir dalam penerimaan beras dikalangan masyarakat. Sistem pembagian seperti ini dikarnakan jumlah data yang selalu berkurang setiap tahunnya, sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima program RASTRA. Jadi dengan menerapkan pembagian rata atau bergulir kepada masyarakat miskin bisa membuat masyarakat miskin lainnya merasakan manfaat program RASTRA. Untuk indikator efesiensi

Program RASTRA di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi menurut peneliti, dan hasil penelitian sudah dikatakan cukup efesiensi berdasarkan usaha-usaha yang aparat pemerintah setempat lakukan sehingga dapat menunjang keberhasilan program RASTRA.

c) Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.Untuk kriteria kecukupan dapat dilihat dari seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah.[57]Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Program RASTRA diberikan kepada masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, dengan memberikan bantuan berupa beras sebanyak 15kg/KK dengan harga Rp.1,600/kg. Berdasarkan hasil penelitian terkait kriteria kecukupan program RASTRA dalam mengatasi permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat sudah tepat karna dengan adanya program seperti ini masyarakat sangat merasa terbantu dalam pemenuhan akan kebutuhan pangan keluarganya sehingga program ini cukup tepat dalam membantu masyarakat.

Namun menurut peneliti, untuk kriteria kecukupan itu masih kurang dirasakan oleh masyarakat penerima program RASTRA, karna jumlah beras yang mereka terima yaitu 15/kg masih kurang untuk KPM yang memiliki banyak

[57]Ibid,hlm.430

anggota keluarga, apalagi dengan adanya pembagian merata membuat jumlah beras yang masyarakat terima makin berkurang. Karna itu jumlah bantuan RASTRA dianggap kurang cukup dalam membantu masyarakat yang memiliki banyak anggota keluarga.

d) Pemerataan

William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.Untuk kriteria pemerataan dapat diketahui apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada mereka kelompok-kelompok yang berbeda.[58]Sesuai dengan PEDUM RASTRA 2017, HTR RASTRA adalah sebesar Rp.1,600/kg, jadi untuk 15kg RASTRA masyarakat membayar HTR sebesar Rp.24.000. Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk biaya HTR yang masyarakat terima itu berbeda-beda, dimana untuk 15kg RASTRA masyarakat membayar sebesar Rp.30000. Perbedaan HTR ini menyebabkan pemerataan program RASTRA dalam hal biaya belum dikatakan merata. Selain itu dengan adanya masyarakat yang berhak tetapi tidak terdaftar dalam penerima program RASTRA juga menyebabkan pemerataan program RASTRA belum tercapai.Kunci dari pemerataan yaitu keadilan.Dari hasil wawancara menyimpulkan bahwa pemerataan penyaluran program RASTRA belum dapat dirasakan oleh semua masyarakat miskin. Karna, masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak terjaring dalam penerimaan program RASTRA, hal ini

[58]Ibid, hlm.434

disebabkan karna jumlah kuota penerima RASTRA yang selalu mengalami pengurangan.

e) Responsivitas.

Menurut Wiliam Dunn Responsivitas *(responsiveness)* berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.[59]Pendapat diatas melihat responsivitas dalam konteks kebijakan sebagai sebuah tanggapan terhadap kepuasan publik terhadap kebijakan yang diambil oleh pejabat publik. Sehingga peneliti berpendapat bahwa responsivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya kepuasaan dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, maka responsivitas program RASTRA sudah cukup baik. Mengenai Program RASTRA sudah dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat penerima program RASTRA, karna bentuk bantuan beras yang mereka dapatkan bisa mereka gunakan untuk makan sehari-hari walaupun jumlahnya selalu berkurang.Tetapi kalau untuk respon masyarakat dalam hal penyaluran, kepuasan masyarakat masih kurang.Karena bantuan beras yang mereka dapatkan sering mengalami keterlambatan, dan jumlah yang tidak tetap, selain itu juga kualitas beras yang tidak begitu bagus walaupun masih layak untuk dikonsumsi.Walaupun demikian, masyarakat sangat bersyukur dengan adanya bantuan RASTRA ini, karena masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga yang cukup terjangkau.

[59]Ibid, hlm.610

f) Ketetapan

Berkaitan dengan dimensi ketepatan *(appropriateness)* WiliamDunn menjelaskan bahwa ketepatan *(appropriateness)* adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan yang tidak berkenaan dengan satuan kriteria lain divide tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.[60]Pendapat Dunn di atas menurut peneliti, bahwa ketepatan merupakan bagian dari langkah yang tepat untuk mengatasi keinginan publik, sehingga langkah tersebut sebagai solusi penyelesaiannya. Hasil wawancara terhadap masyarakat penerima program RASTRA menggambarkan bahwa untuk ketetapan program RASTRA sudah dikatakan sangat tepat dalam menanggulangi kemiskinan ditingkat masyarakat dengan memberikan bantuan beras setiap bulannya dengan harga yang cukup terjangkau. Hanya saja sistem dalam penyaluran RASTRA itu harus lebih ditingkatkan supaya tepat sasaran dalam pelaksanaan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat miskin.

Berdasarkan 6 (Enam) kriteria evaluasi dan hasil penelitian yang peneliti lakukan di 3 (Tiga) desa di Kecamatan Mersam, maka peneliti menyimpulkan bahwa program RASTRA di Kecamatan Mersam belum sepenuhnya berhasil, karena masih ditemukannya kendala-kendala dalam penyaluran program RASTRA yang menghambat tujuan program RASTRA tidak tercapai sebagaimana yang ditetapkan. Berdasarkan Evaluasi Program RASTRA di Kecamatan Mersam yang peneliti lakukan, maka untuk kedepannya program ini

[60]Ibid, hlm. 610

perlu dilakukan perbaikan, terutama dalam hal penyaluran. Perbaikan tersebut diantaranya mengenai jumlah data penerima program RASTRA, diharapkan kuota data penerima RASTRA diperbanyak supaya masyarakat miskin bisa terjaring sebagai penerima program, selanjutnya jumlah bantuan, HTR, kualitas dan waktu datangnya beras harus benar-benar sesuai dengan yang ditetapkan, supaya program benar-benar bisa membantu masyarakat penerima program RASTRA. Selain perbaikan dalam hal penyaluran, juga diperlukan perbaikan ditingkat aparat pemerintah setempat yang memiliki tanggung jawab terhadap berjalannya program RASTRA, diharapkan aparat pemerintah setempat bisa melakukan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang ditetapkan, karna selama penelitian, peneliti bisa menyimpulkan bahwa kendala atau masalah yang ditemui dalam Program RASTRA disebabkan dari aparat pemerintah setempat sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dikalangan masyarakat itu sendiri. Dengan perbaikan tersebut diharapkan Program RASTRA bisa mencapai tujuan dan sasaran untuk kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dilapangan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pendistribusian program RASTRA di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi belum terlaksana dengan baik, yaitu sesuai dengan pedoman umum program RASTRA 2017. Pendistribusian program RASTRA yang belum sesuai harapan, karna masih banyaknya ditemukan kendala-kendala dalam pendistribusian program RASTRA sampai kepada masyarakat (KPM). hal ini dapat dilihat mulai dari jumlah beras yang masyarakat terima yang tidak sesuai dengan ketetapan yaitu kurang dari 15kg/KK, begitu juga dengan waktu datangnya beras dimana beras yang seharusnya datang 1 bulan sekali ternyata 3 bulan sekali, dan jumlah harga tebus RASTRA yang masyarakat terima itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu RP.1,600/kg.
2. Faktor penghambat keberhasilan program RASTRA yang peneliti lakukan, yaitu masalah pendataan yang berkurang setiap tahunnya. Dimana masalah pendataan merupakan masalah yang selalu ditemukan setiap tahun sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat miskin yang berhak tidak terjaring dalam pendataan untuk penerima program

beras sejahtera sehingga menyebabkan polemik di masyarakat dan juga untuk penerima program PKH juga tidak bisa dikeluarkan dari daftar penerima RASTRA. Sedangkan faktor yang menjadi pendukung keberhasilan program RASTRA merupakan faktor internal berasal dari dalam diri SDM, yaitu faktor dari aparat pemerintah setempat dan masyarakat itu sendiri.

3. Berdasarkan 6 kriteria evaluasi kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Beras Sejahtera (RASTRA) Di Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi belum berhasil, karna masih banyaknya ditemukan kendala yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan program. Perlu dilakukan Evaluasi terhadap program beras sejahtera (RASTRA) agar tujuan dari program dapat tercapai tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang sering ditemukan.

B. SARAN

Dari kesimpulan di atas beberapa saran yang dapat diberikan peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan kembali pemutakhiran data penerima bantuan program RASTRA sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh BPS dalam menentukan kpm program RASTRA tersebut, yang disertai dengan kesepakatan masyarakat setempat.
2. Pemerintah harus mengontrol dan mengawasi pendistribusian beras terutama mengenai stok ketersediaan RASTRA setiap bulannya jangan sampai terjadi kekosongan, selain itu pendistribusian RASTRA di kelurahan harus dilakukan pengawasan agar tidak terjadi keterlambatan dan juga pemerintah harus mengontrol standar mutu dari beras yang akan didistribusikan ke desa.
3. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi solusi bagi aparat Pemerintah di Kecamatan Mersam, sebagai acuan dalam memperbaiki program RASTRA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 177.

Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58.

Ahmadi Abu, *Ilmu Sosial Dasar* , Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Arikunto, Suharsimi, *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Akdon Riduan, *Rumus Dan Data Dalam Analisis Statistik*, Bandung: Alfabeta, 2009.

J. Rachbini Didik, *Ekonomi Politik Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Jakarta: Granit, 2004.

Jones Charles O ,*Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996.

Noor Juliansyah, *Metode Penelitian*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

Nurcholis Hanif,*Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2007.

N. DunnWilliam, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2003.

R. Mayer Robert dan Ernest Greenwood, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Jakarta:CV. Rjawali, 1984.

Suyanto Bagong, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif,Kuantitatif, dan R&D*, Alfabeta:Bandung, 2013.

Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*,IAIN STS Jambi: Fakultas Syari'ah dan Syaria'ah press, 2014.

Tilaar dan Nugroho Riant, *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Wirawan, *Evaluasi:Tteori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*, Jakarta: Rajawali pers, 2012.

B. Sumber Lain

www.bulog.co.od/sekilas*raskin*

Pedoman Umum (PEDUM) Beras Sejahtera (RASTRA) tahun 2017.

Nurhayati, "Evaluasi Program Beras Miskin," Naskah Publikasi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2014.

Suparti, "Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Miskin (RASKIN) di Kecamatan Samarinda Ulu,"*Journal Administrative Reform*, Vol.5.No.1, 2017.

Yeni Juwita, "Evaluasi Program Beras Sejahtera (RASTRA)," Naskah Publikasi Universitas Maritim Raja Ali haji Tanjung Pinang, 2016.

Yuma Yunita, "Evaluasi Keberhasilan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (raskin) dan Manfaatnya Bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat(rts-pm)," Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang, 2014.

Citra Gustianda, "Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan", 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN
BATANG HARI
KANTOR DESA
SENGKATI KECIL
JL. KARAY BETON RT.04

PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN
KABUPATEN BATANG HARI
NAMA KK / RTS-PM
JUMLAH KELUARGA
DESA / KELURAHAN
KECAMATAN
MERSAM
Dasar
Surat Menko Kesra No.B-195 / MENKO / KESRA / X / 2014
dan No.B-1739 / KMK / DEP.II / XI / 2014

CURRICULUM VITAE

A. Informasi diri

Nama	:	ENDA MERI ASTUTI
NIM	:	SIP.141720
TTL	:	Kembang Paseban, 21 Maret 1996
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Kelurahan Kembang Paseban RT, 016, Kec. Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.
Nama Ayah	:	M. MUSA
Nama Ibu	:	ERNAWATI
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Jurusan	:	Ilmu Pemerintahan
No Hp	:	082306014633

B. Riwayat pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TEMPAT	TAHUN LULUS
1	SDN 68/1 SIMPANG MERSAM	BATANG HARI	2008
2	MTS NURUL ISLAM KEMBANG TANJUNG	BATANG HARI	2011
3	SMAN 4 BATANG HARI	BATANG HARI	2014